

**PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *NEO-VERNAKULAR***

**LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
(LP3A)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana
Program (S.I) Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Dosen Pembimbing :

- 1. Shofiyah Nurmasari, S.T., M.T**
- 2. Miftahul Khairi, M.Sn.**



Disusun oleh:

MUHAMMAD RIZQI

2004056017

PRODI ILMU SENI DAN ARSITEKTUR ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Semarang, Telp/ Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Rizqi
NIM : 2004056017
Judul : **PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal 27 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 27 Maret 2024

Ketua Sidang



Dr. Zainul Arifin, M.P.d.
NIP. 19730826200212106

Sekretaris Sidang

Abdullah, M.P.d.
NIP. 197605252016011901

Penguji Utama 1

Alifiano Rezka Adi, S.T., M.T.
NIP. 199109192019031016

Penguji Utama 2

Miftahul Khairi, M.Sn.
NIP. 199105282018011002

Pembimbing I

Shofiyah Nurmasari, S.T., M.T.
NIP. 198406282019032006

Pembimbing II

Miftahul Khairi, M.Sn.
NIP. 199105282018011002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZQI

NIM : 2004056017

Jurusan : Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul : **"PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil kerja saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan,, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Februari 2024



METERA
TEMPEL

Muhammad Rizqi

NIM. 2004056017

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN HUMANIORA

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50158

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD RIZQI

NIM : 2004056017

Jurusan : Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Judul : **"PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Februari 2024

Pembimbing I

Shofiyah Nurmasari, S.T., M.T.

NIP.198406282019032006

Pembimbing II

Miftahul Khairi, M.Sn.

NIP.199105282018011002

MOTTO HIDUP

The price of greatness is responsibility

Harga dari kebesaran adalah tanggung jawab

(Winston churchill)

ABSTRAK

Arsitektur *Neo-vernacular* merupakan suatu gerakan yang berkembang pada masa postmodernisme, yaitu gerakan arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an. Postmodernisme muncul sehubungan dengan protes para arsitek modernis terhadap model-model yang terkesan monoton (bangunan berbentuk balok), yang diyakini tidak memiliki karakter yang dapat membedakan bangunan dengan bangunan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode perancangan J. Zeisel. Dalam hal ini penerapan arsitektur neo-vernakular pada pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara yaitu dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan Masjid Astana Sultan yang memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen motif dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri . Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi “Perahu” yang mana menggambarkan sebagian besar masyarakat jepara adalah sebagai nelayan. Perancangan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara melalui pendekatan Arsitektur Neo-vernakular bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk masyarakat juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal pada era yang semakin modern dalam segala aspek terutama segi infrastruktur agar tidak tergerus oleh zaman dan hilang terlupakan di masa mendatang.

Kata Kunci : Arsitektur Neo-vernakular, Gedung Mall Pelayanan Publik Jepara

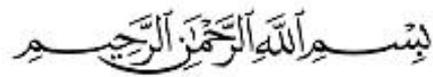
ABSTRACT

Neo-vernacular architecture is a movement that developed during postmodernism, an architectural movement that emerged in the mid-1960s. Postmodernism emerged in connection with the protest of modernist architects against monotonous models (block-shaped buildings), which were believed to have no character that could distinguish buildings from other buildings. The method used in this research is to use the J. Zeisel design method. In this case, the application of neo-vernacular architecture in the construction of the Public Service Mall Building "MPP" in Jepara Regency is by applying the joglo roof of the Astana Sultan Mosque building which has a mixed architectural style from Hindhu-Buddhist, Javanese and Chinese cultures combined with motif ornaments from troso blangket batik

which is also one of the characteristics of Jepara Regency itself. On the other hand, the main building is inspired by the means of transportation "Ship" which describes most of the Jepara people as fishermen. The design of the Public Service Mall "MPP" in Jepara Regency through the Neo-vernacular Architecture approach aims to provide more optimal services for the community and is also expected to be used as one of the solutions to maintain and preserve local cultural patterns in an increasingly modern era in all aspects, especially in terms of infrastructure so as not to be eroded by the times and lost to oblivion in the future.

Keywords : Neo-vernacular Architecture, Jepara Public Service Mall Building.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Yang pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.Hum) dalam prodi jurusan Ilmu Seni Arsitektur Islam di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan skripsi ini tidak akan mudah terwujud tanpa adanya bantuan semua pihak yang telah terlibat dalam membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusinya dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Shofiyah Nurmasari, M.T. selaku pembimbing 1 dan bapak Miftahul khairi M.Sn yang telah ikhlas memberikan arahan, masukan, kritikan dan saran terhadap tugas akhir penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Edi Sucipto dan Ibu Masrikatun yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Dr. Zainul Adzfar, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Edi Istanto, S.T dan Dorian Nanduo S.Tr selaku pembimbing dan motivator dalam dunia arsitektur yang telah membantu memberikan masukan arahan terhadap tugas akhir penulis.
7. Dwi Muswanti yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk berjuang menyelesaikan laporan tugas akhir ini sampai selesai.
8. Teman-teman ISAI 2020 khususnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menemani dan memberikan saling support.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu khususnya dalam Tugas akhir, terima kasih, semoga semua kebaikan kalian di balas dengan pahala dari Allah yang maha kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 24 Februari 2024

Muhammad Rizqi
2004056017

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	II
NOTA PEMBIMBING.....	III
MOTTO HIDUP.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Judul.....	1
1.1.1 Pengertian Mall Pelayanan Publik.....	1
1.1.2 Profil Kabupaten Jepara.....	1
1.1.3 Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular.....	2
1.2 Latar Belakang.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.3.1 Permasalahan Umum.....	6
1.3.2 Permasalahan khusus.....	6
1.4 Tujuan dan Sasaran.....	7
1.4.1 Tujuan.....	7
1.4.2 Sasaran.....	7
1.5 Lingkup Pembahasan.....	7
1.5.1 Unsur Substansi.....	7
1.5.2 Lingkup Spasial.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
1.7 Keaslian Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 MALL PELAYANAN PUBLIK.....	11

2.1.1 Pengertian Mall Pelayanan Publik (MPP).....	11
2.1.2 Tujuan Mall Pelayanan Publik (MPP).....	11
2.1.3 Prinsip Mall Pelayanan Publik (MPP).....	12
2.1.4 Dasar Hukum Pelayanan Publik (MPP).....	12
2.1.5 Pengklasifikasian Instansi Dalam Mall Pelayanan Publik “MPP”.....	14
2.2 KABUPATEN JEPARA.....	15
2.2.1 Gambaran umum Kabupaten Jepara.....	15
2.3 ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR.....	16
2.3.1 Pengertian Arsitektur <i>Neo-Vernakular</i>	16
2.3.2 Ciri-ciri arsitektur Neo-Vernakular.....	17
2.3.3 Prinsip-prinsip perancangan Arsitektur Neo-Vernakular.....	17
2.3.4 Metode eksplorasi untuk pembaharuan dalam arsitektur <i>Neo-Vernacular</i>	18
2.3.5 Karakteristik Arsitektut <i>Neo-Vernakular</i>	19
2.4 STUDI PRESEDEN.....	19
2.4.1 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.....	19
2.4.2 Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta.....	21
BAB III METODE PERANCANGAN.....	23
3.1 IDE PERANCANGAN.....	23
3.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	23
3.3 PENGUMPULAN DATA.....	23
3.4 ALUR POLA PIKIR.....	26
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 ANALISA FUNGSIONAL.....	27
4.1.1 Program ruang.....	27
4.2 ANALISA KONTEKSTUAL.....	31
4.2.1 Pemilihan site.....	31
4.2.2 Analisa site.....	32
4.3 ANALISA SPESIFIKASI DAN TEKNIS.....	35
4.4 ANALISA ASPEK KINERJA (UTILITAS).....	41
4.4.1 Sistem mekanikal.....	42

4.4.2 Sistem elektrikl.....	45
Sistem Penginderaan Kebakaran, Alarm dan Tanda-tanda Khusus (<i>Fire Alarm System</i>).....	47
Sistem Tata Suara.....	48
Sistem Telepon.....	49
Sistem CCTV.....	49
4.5 ANALISA ARSITEKTURAL.....	50
4.5.1 Pengembangan prinsip budaya lokal.....	50
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 PENGEMBANGAN KONSEP PERANCANGAN.....	52
5.1.1 <i>Secondary skin</i>	52
5.1.2 <i>Folliage</i>	52
5.1.3 <i>Glassblock</i>	52
5.2 SIMPULAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031.....	1
Gambar 1.2 Jumlah Kecamatan Sumber BPS Kabupaten Jepara 2017.....	2
Gambar 2.1 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.....	20
Gambar 2.2 Desain Mall Pelayanan Publik Pekan Baru.....	20
Gambar 2.3 Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta.....	21
Gambar 2.4 Desain Interior MPP Kota Surakarta.....	22
Gambar 3.1 Gambar alur pikir.....	26
Gambar 4.1 Pemilihan Site.....	31
Gambar 4.2 Pohon Ketapang Kencana.....	32
Gambar 4.3 Pohon Cemara.....	33
Gambar 4.4 Pohon Flamboyan.....	33
Gambar 4.5 Pohon Kersem.....	33
Gambar 4.6 Pohon Parahyba.....	33
Gambar 4.7 Pohon Palem Raja.....	33
Gambar 4.8 Tumbuhan Sikat Botol.....	33
Gambar 4.9 Tanaman Aglaonema.....	33
Gambar 4.10 Exhaust Fan.....	43
Gambar 4.11 Exhaust Air.....	43
Gambar 4.12 Sistem Saluran Pembuangan (drainase).....	45
Gambar 4.13 Fire Extinguisher dan Hydrant and Sprinkler.....	45
Gambar 4.14 Diesel Generator siets.....	47
Gambar 4.15 Central control fire alarm.....	48
Gambar 4.16 Sound system.....	48
Gambar 4.17 Voice evacuation.....	49
Gambar 4.18 CCTV.....	49
Gambar 4.19 Bentuk Bangunan Utama.....	50
Gambar 4.20 Implementasi Atap Joglo.....	50
Gambar 4.21 Motif Batik Blangket Troso.....	51
Gambar 5.1 Glassblock.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Mall Pelayanan Publik.....	6
Tabel 1.2 Keaslian Penulisan.....	10
Tabel 2.1 Dasar Hukum Pelayanan MPP.....	13
Tabel 2.2 Dasar Hukum Pelayanan MPP.....	14
Tabel 4.1 Program Ruang Service.....	27
Tabel 4.2 Program Ruang Pelayanan Publik.....	28
Tabel 4.3 Program Ruang Pengelola.....	30
Tabel 4.4 Analisa Spesifikasi dan teknis.....	36

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan dengan jarak terdekat dari ibu Kabupaten kabupaten adalah Kecamatan tahunan, yaitu 7 km dan yang terjauh adalah kecamatan karimunjawa, yaitu 90 km. luas wilayah kabupaten jepara adalah 1.004.132 km², dengan kacamatan terluas adalah kecamatan keling (123,116 km²) dan yang terkecil adalah kecamatan kalinyamatan (23,700 km²).

Secara lebih detail, luas dari masing masing kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Desa/Kel
1.	Kedung	43,063	4,29	18
2.	Pecangan	35,878	3,57	12
3.	Kalinyamatan	23,700	2,36	12
4.	Welahan	27,642	2,75	15
5.	Mayong	65,043	6,48	18
6.	Nalumsari	56,965	5,67	15
7.	Batealit	88,879	8,85	11
8.	Tahunan	38,906	3,87	15
9.	Jepara	24,667	2,46	16
10.	Mlonggo	42,402	4,22	8
11.	Pakis Aji	60,553	6,03	8
12.	Bangsri	85,352	8,50	12
13.	Kembang	108,124	10,77	11
14.	Keling	123,116	12,26	12
15.	Donorojo	108,642	10,82	8
16.	Karimunjawa	71,200	7,09	4
	Jumlah	1.004,132	100,00	195

Gambar 1. 2 Jumlah kecamatan Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017

1.1.3 Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur *Neo-Vernakular* merupakan konsep arsitektur yang berkembang pada era post-modern, mulai muncul pada tahun 1960-an. Kata “Vernakuler” berasal dari Bahasa latin yang memiliki arti Bahasa setempat atau pribumi, dan kata “Neo” sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti baru. Menurut Arsi Media (2019) Arsitektur *Neo-Vernakular* dapat diartikan sebagai bahasa setempat yang di ucapkan dengan cara baru. Arsitektur *Neo-Vernacular* merupakan arsitektur yang memiliki prinsip mempertimbangkan peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, kaidah-kaidah normative, kosmologis serta keselarasan antara bangunan, lingkungan, dan alam.

Arsitektur vernakular yang ada pada masa arsitektur modern awal, berkembang menjadi arsitektur neo vernakular pada masa modern akhir setelah adanya berbagai

macam kritikan terhadap arsitektur modern. Menurut Arsimedia (2019) Berikut ini adalah kriteria-kriteria dari arsitektur *Neo-Vernakular*:

1. Memiliki bentuk-bentuk dengan unsur budaya dan lingkungan, termasuk iklim setempat, yang digambarkan melalui ornamen, tata letak denah, struktur dan detail.
2. Menerapkan elemen fisik maupun elemen non-fisik seperti kepercayaan, budaya, pola pikir, tata letak dalam bentuk yang lebih modern.
3. Produk dari Arsitektur neo-vernacular ini akan menghasilkan karya yang baru dan tidak menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular secara murni.

1.2 Latar Belakang

Telah kita ketahui bersama bahwa Mall Pelayanan Publik “MPP” merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.¹ Sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-undang terkait dengan pelayanan publik yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa “*Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.²

Untuk mewujudkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mana secara tidak langsung menuntut pelayanan yang cepat, mudah serta akuntabel dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Berdirinya Mall Pelayanan Publik “MPP” merupakan suatu bentuk perjalanan pembaharuan serta sebuah langkah yang strategis terutama bagi sistem pelayanan

¹ Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

publik di Indonesia. Hal ini dikarenakan, MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Selain itu, dengan berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yakni percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Serta untuk meningkatkan nilai *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia yang mana secara tidak langsung diharapkan dapat mengubah pola pikir ego sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten tersebut berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Selain itu, wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa yang berada di Laut Jawa dan untuk Kabupaten Jepara sendiri mempunyai luas sebesar 27.263 km². Untuk menunjang serta menciptakan Kabupaten Jepara yang lebih maju dan semakin berkembang tentu saja perlu ditunjang dengan adanya infrastruktur yang memadai terlebih dari segi infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat contohnya Mall Pelayanan Publik “MPP”.

Terkait dengan Mall Pelayanan Publik “MPP” yang terdapat di Kabupaten Jepara sendiri sudah diresmikan pada tanggal 1 Juli 2020 bertempat di Kantor Organisasi Perangkat Daerah “OPD” yang mana sudah difasilitasi sebanyak 19 gerai dari berbagai perangkat daerah terdiri dari 10 dinas Kabupaten, dua dinas Provinsi, dan delapan instansi vertikal yang membuka layanan di MPP Jepara yang nantinya sebanyak 222 total pelayanan baik berupa perizinan maupun non perizinan.³ Dari hal tersebut tentu saja semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam jenis layanan yang terdapat di instansi pemerintah di satu tempat baik mulai perizinan, administrasi kependudukan, pajak, retribusi, aduan maupun konsultasi dengan tujuan tidaklah lain untuk memberikan pelayanan yang cepat, dan terbaik untuk masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan serta menciptakan layanan publik yang prima disisi lain juga perlu untuk selalu adaptif dan berinovasi terhadap segala macam bentuk perubahan terutama pada era globalisasi yang mana untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan MPP agar semakin maju dan optimal ke depannya. Masalah yang

³ Yandip Prov Jateng, “Mall Pelayanan Publik Jepara Diresmikan”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mal-pelayanan-publik-jepara-diresmikan/> diakses 11 Oktober 2023.

melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Mall Pelayanan Publik “MPP” yang terdapat di Kabupaten Jepara berdasarkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat pada jangka panjang 5-10 tahun ke depan terkait gedung tersebut tentu saja sudah tidak layak pakai dan tentunya perlu dilakukan pembaharuan, serta inovasi lebih lanjut. Kemudian, disisi lain kebutuhan akan ruang serta fasilitas yang kurang memadai juga menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana apa yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya dengan tanpa melakukan penggusuran terhadap gedung-gedung yang sudah ada.

Untuk menciptakan inovasi baru dalam proses pembangunan infrastruktur gedung Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara nantinya, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan tema Arsitektur *Neo-Vernakular* yaitu dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan Masjid Astana Sultan yang memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen motif dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri . Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi “Perahu” yang mana menggambarkan sebagian besar masyarakat jepara adalah sebagai nelayan. Diharapkan melalui pendekatan dengan konsep Arsitektur *Neo-vernakular* dalam proses pembangunan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara tersebut disamping memberikan manfaat pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat juga diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal di era modernisasi yang semakin meningkat di segala aspek, terutama dalam bidang infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rancangan wadah fisik Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara yang berkonsep satu pintu, dimana mampu memperpendek, mempermudah dan memperdekat segala urusan layanan serta menganalisis rancangan dan kompleksitas bangunan Mall Pelayanan Publik atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik itu dari segi lokasi, program ruang, sirkulasi dan bidang-bidang arsitektur lainnya, sehingga mampu mewadahi kegiatan-kegiatan penggunaannya. Selain itu, apabila dilihat dari kondisi pemetaan Kabupaten Jepara dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kantor pelayanan publik di Kabupaten Jepara tersebar dan berpusat di sepanjang jalan Pemuda-Jalan Kartini. Disisi lain yaitu pada daerah pinggiran Kabupaten Jepara yang bisa terbilang cukup

jauh disertai problematika yang ada bilamana terdapatnya masyarakat yang mempunyai data cukup beragam dalam pengajuan surat administratifnya secara tidak langsung menunjukkan ketidakefisienan bagi itu dari segi waktu maupun tempat bagi kalangan masyarakat tepi Kabupaten Jepara.

Untuk menunjang pentingnya keberadaan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara dalam hal ini penulis menyertakan jumlah data keseluruhan terkait dengan pelayanan maupun instansi Mall Pelayanan Publik dalam suatu wilayah baik itu Kabupaten maupun Kota sebagai bentuk pertimbangan pada sebuah tabel sebagai berikut:

NO	KOTA/KABUPATEN	JUMLAH INSTANSI	JUMLAH PELAYANAN
1.	Kabupaten Jepara	19	222
2.	Kabupaten Kudus	24	387
3.	Kabupaten Pati	22	305
4.	Kabupaten Grobogan	32	-
5.	Kota Semarang	39	165

Tabel 1. 1 Jumlah Mall Pelayanan Publik

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur (LP3A) ini dengan judul **“PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR”**.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Permasalahan Umum

Bagaimana merancang mall pelayanan publik “MPP” untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Juga untuk meningkatkan daya saing global yang diwujudkan dengan memberikan kemudahan berusaha di kabupaten Jepara?

1.3.2 Permasalahan khusus

Bagaimana penerapan arsitektur *Neo-vernakular* pada sebuah gedung mall pelayanan publik “MPP” agar dapat menjunjung tinggi prinsip dan budaya daerah setempat?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

- a. Untuk merancang mall pelayanan publik untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Juga untuk meningkatkan daya saing global yang diwujudkan dengan memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Jepara
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan arsitektur *Neo-Vernakular* pada sebuah gedung mall pelayanan publik agar dapat menjunjung tinggi prinsip dan budaya daerah setempat

1.4.2 Sasaran

Memberikan kemudahan, keterjangkauan, keamanan, serta kenyamanan kepada seluruh masyarakat kabupaten Jepara dalam mendapatkan pelayanan, selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan untuk berwirausaha di Indonesia terutama di kabupaten Jepara.

1.5 Lingkup Pembahasan

1.5.1 Unsur Substansi

1.5.1.1 Tata ruang luar

- a. Landscape
- b. Sirkulasi
- c. Fasilitas outdoor
- d. Kebutuhan SRP dan RTH

1.5.1.2 Tata ruang dalam

- a. Jenis, jumlah, besaran ruang.
- b. Hierarki dan konfigurasi ruang
- c. Sirkulasi
- d. Fasilitas indoor
- e. Suasana

1.5.2 Lingkup Spasial

Lokasi yang di pilih berada di Kawasan Demaan VII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59419. Status dan fungsi lahan ini adalah tanah kosong, tapak berada tepad depab Gedung Wanita Jepara denga luas lahan 18.669m²

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Penulisan Laporan Konsep Tugas Akhir ini yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang uraian dan penjelasan secara umum isi keseluruhan karya tulis yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, sistematika penulisan, dan keaslian penulisan. Selain itu juga terdapat pengertian dan penjelasan judul yang menjelaskan secara singkat tentang konsep perancangan tugas akhir ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi dasar atau teori yang relevan dengan objek dan permasalahan perancangan. Teori-teori yang akan diuraikan meliputi pengertian objek bangunan, standar bangunan, tinjauan dari pendekatan judul, studi preseden terkait fungsi bangunan atau tema yang sama.

3. BAB III METODE PERANCANGAN

Bab metode perancangan ini menjelaskan bagaimana pendekatan konsep dan tema perancangan, serta alur proses merancang melalui tahapan perancangan.

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab analisa dan pembahasan berisi proses analisa data dan sintesa untuk menemukan konsep. Pada bagian ini diuraikan lokasi existing site, pemilihan site, analisa site, analisa program ruang, dan analisa tema.

5. BAB V DRAFT KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Bab draft konsep perancangan akan diuraikan tahap awal pengembangan sebagai hasil akhir dari bab analisa dan pembahasan, berupa gubahan massa, organisasi ruang makro dan ruang mikro, serta penentuan konsep atau penekanan perancangan. Selain itu, ada kesimpulan dan saran.

1.7 Keaslian Penulisan

Dilihat dari beberapa judul pra tugas akhir dan beberapa karya tulis dari sumber lain, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Hal tersebut dapat terlihat pada tipe bangunan, objek sasaran, konsep maupun pendekatan yang digunakan. Beberapa judul tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No	JUDUL	SUBSTANSI	PERBEDAAN
1.	PENERAPAN TEMA NEO- VERNAKULAR PADA WAJAH BANGUNAN GEDUNG UTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI⁴	Dalam penelitian tersebut, penulis mengambil kasus bangunan Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagai objek yang diteliti yang mengadaptasikan bentuk Arsitektur Tradisional Bali di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dari pengamatan terhadap wajah bangunan Gedung Utama DPRD Provinsi Bali, disimpulkan bahwa secara umum kriteria, ciri dan prinsip tema Arsitektur Neo Vernakular terlihat cukup jelas pada wajah bangunannya	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi site - Penerapan kebudayaan lokal setempat - Gedung bangunan
2.	PUSAT KEBUDAYAAN DI MANDALIKA LOMBOK TENGAH, N.T.B DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-	Metode yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kajian perancangan dalam mendesain Pusat Kebudayaan di Mandalika Lombok Tengah dengan menjelaskan dari proses perancangan yang diperoleh dari studi literature dan studi survey lapangan, sehingga dapat memberi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi site - Penerapan kebudayaan lokal setempat

⁴ Saidi, Agus Wiryadhi, Ni Putu Anggita Suma Astari, and Krisna Adi Prayoga. "Penerapan Tema Neo Vernakular Pada Wajah Bangunan Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali." *Jurnal Teknik Gradien* 11.2 (2019): 136-144.

	VERNAKULAR⁵	gambaran untuk mendukung perancangan objek dari penelitian tersebut. Proses desain dan perancangan bangunan ini akan diciptakan suatu wadah yang akan menampung kebudayaan daerah setempat guna memperkenalkan budaya setempat kepada wisatawan local dan mancanegara serta dapat mengadaptasi dengan bentuk ciri khas daerah setempat.	
3.	PERANCANGAN MUSEUM BATIK NASIONAL DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR⁶	Dalam penelitian rancangan bangunan tersebut penulis menitikberatkan pada aspek tradisional dan modern yang mana dengan tujuan untuk menampilkan serta memperkenalkan jenis" batik yang terdapat di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep bangunan - Tata Kelola ruang dan bangunan - Lokasi site - Penerapan kebudayaan setempat

Tabel 1. 2 Keaslian penulisan

⁵ Cahyadi, Dedy, and Murwantoro Panghargiyo. *PUSAT KEBUDAYAAN DI MANDALIKA LOMBOK TENGAH, NTB Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular DESIGN OF A CULTURE CENTER IN MANDALIKA, CENTRAL LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT With a Neo Vernacular Architectural Approach*. Diss. University of Technology Yogyakarta, 2021.

⁶ Azismail, Rezaldi, and Endang Setyowati. *Perancangan museum batik nasional di kota yogyakarta dengan pendekatan arsitektur neo vernakular*. Diss. University of Technology Yogyakarta, 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 MALL PELAYANAN PUBLIK

2.1.1 Pengertian Mall Pelayanan Publik (MPP)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 yang dimaksud dengan mall pelayanan publik “MPP” merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.⁷

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, independent yang di bentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk pelayanan publik. Organisasi pelayanan publik yang selanjutnya di sebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang di bentuk berdasar kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan Mall Pelayanan Publik (MPP)

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) penyelenggaraan mall dalam penetapan Nomor 23 Tahun 2017 dan berikut tujuan dari adanya Mall Pelayanan Publik “MPP” yaitu:

⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

2.1.3 Prinsip Mall Pelayanan Publik (MPP)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB), Penyelenggaraan mall dalam penetapan Nomor 23 Tahun 2017 dengan di dirikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) tentunya memiliki beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterpaduan
- b. Berdaya guna
- c. Koordinasi
- d. Akuntabilitas
- e. Aksesibilitas
- f. Kenyamanan

2.1.4 Dasar Hukum Pelayanan Publik (MPP)

Terdapat beberapa dasar hukum maupun peraturan mengenai Mall Pelayanan Publik dan menurut Imanudin tentang penetapan percontohan Mall Pelayanan Publik “MPP” yaitu:

No	Peraturan	Tentang
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002	Bangunan Gedung
3.	Peraturan Menteri, Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2021	Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan	Petunjuk teknis penyelenggaraan

	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021	mal pelayanan publik
5.	Peraturan Menteri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) Tahun 2017	Penyelenggaraan mall pelayanan publik “MPP”.
6.	Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) Nomor 135 Tahun 2017	Percontohan penetapan mall pelayanan publik “MPP”
7.	Keputusan Menteri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KemenPan-RB) Nomor 11 Tahun 2018	Penetapan lokasi penyalahgunaan mall pelayanan publik (11 lokasi)
8.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10.	Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2020	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Tabel 2. 1 Dasar hukum pelayanan MPP

2.1.5 Pengklasifikasian Instansi Dalam Mall Pelayanan Publik “MPP”

No	NAMA INSTANSI	PUBLIK	PRIVAT
1.	DPMPTSP	PUBLIK	-
2.	PENGADILAN AGAMA	PUBLIK	-
3.	PENGADILAN NEGERI	PUBLIK	-
4.	SAMSAT	PUBLIK	-
5.	DISDUKCAPIL	PUBLIK	-
6.	BPJS KESEHATAN	PUBLIK	-
7.	BPJS KETENAGAKERJAAN	PUBLIK	-
8.	KEMENAG	PUBLIK	-
9.	POLRES	PUBLIK	-
10.	KP2KP	PUBLIK	-
11.	PDAM	PUBLIK	-
12.	UNIT LAYANAN PENGADAAN	PUBLIK	-
13.	DINAS PERHUBUNGAN	PUBLIK	-
14.	NOTARIS	-	PRIVAT
15.	BPPKAD	PUBLIK	-
16.	DPUPR	PUBLIK	-
17.	KEJAKSAAN NEGERI	PUBLIK	-
18.	DISPERINDAG	PUBLIK	-
19.	BP2MI	PUBLIK	-
20.	DISKOPUKMNAKERTRANS	PUBLIK	-
21.	PLN	PUBLIK	-
22.	BPN	PUBLIK	-
23.	PERPAJAKAN	PUBLIK	-
24.	DINARPUSDA	PUBLIK	-
25.	DINAS SOSIAL	PUBLIK	-
26.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PUBLIK	-

Tabel 2. 2 Dasar hukum pelayanan MPP

2.2 KABUPATEN JEPARA

2.2.1 Gambaran umum Kabupaten Jepara

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48.02" sampai 110° 58' 37.40" bujur timur dan 5° 43' 20.67" sampai 6° 47' 25.83" lintang selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu Kabupaten di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu Kabupaten Provinsi sekitar 71 kilometer dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih dari 2 jam. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai 82 km. Selain itu juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 27 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni, dan 22 pulau tidak berpenghuni. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi menjadi 195 desa atau kelurahan, terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan. Satu kecamatan terpisah dengan Pulau Jawa yaitu Pulau Karimunjawa.

Wilayah tersempit di Kabupaten Jepara adalah kecamatan Kalinyamatan (2.371,001 ha) sedangkan wilayah terluas adalah kecamatan Keling (12.311,588 ha). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering sebesar 74.122,133 ha (78,82%) dan sisanya merupakan tanah sawah sebesar 26.291,056 ha (26,28%). Kecamatan Keling merupakan kecamatan terluas yaitu 12.311,588 ha yang terdiri dari 2.270.124 ha tanah sawah dan 10.041.464 ha tanah kering. Sedangkan kecamatan terkecil yaitu kecamatan Kalinyamatan seluas 2.370.001 ha yang terdiri dari 1.391.357 ha tanah sawah dan 978.644 ha tanah kering.

Secara topografi, Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu wilayah pantai dibagian pesisir Tengah dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng Tengah dari gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan dibagian utara merupakan serangkaian kepulauan Karimunjawa. Kondisi topografi yang demikian, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah pantai terendah adalah kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan kabupaten Jepara terbagi menjadi empat kemiringan lahan, yaitu datar

41.327,060 ha, bergelombang 37.689,917 ha, curam 10.776 ha dan sangat curam 10.620,212 ha.

2.3 ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR

2.3.1 Pengertian Arsitektur *Neo-Vernakular*

Istilah arsitektur vernakular yang berkembang di dunia konstruksi pada dasarnya merupakan pengembangan dari arsitektur tradisional yang terbentuk oleh tradisi turun-temurun, tanpa adanya pengaruh dari luar. Vernakular memiliki pengertian sebagai bahasa setempat. Pada lingkup arsitektur, vernakular digunakan sebagai istilah untuk mendefinisikan bentuk-bentuk yang menerapkan unsur-unsur budaya setempat maupun lingkungan sekitar termasuk iklim yang diungkapkan dalam bentuk arsitektural baik fisik maupun non fisik (*zonasi, blockplan, struktur, detail, ornamen dan lain-lain*).

Seiring berkembangnya teknologi dalam dunia konstruksi pada era arsitektur Modern, karya arsitektural pun mulai mengedepankan nilai fungsional dari sebuah bangunan dan tidak lagi menggunakan unsur-unsur budaya setempat seperti pada arsitektur vernakular. Namun arsitektur modern justru menghasilkan karya arsitektural yang monoton dan tidak memiliki karakter yang mampu membedakan bangunan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan timbulnya suatu sikap dalam bentuk protes dari para arsitek, sehingga muncul paham baru yaitu arsitektur *Post-Modern*.

Menurut Charles Jencks, terdapat beberapa penyebab yang mendasari munculnya era Post Modern diantaranya, perkembangan teknologi dan komunikasi yang menyebabkan kehidupan ikut berkembang dari terbatas menjadi tidak terbatas. Namun pada era ini, perkembangan tersebut tetap diikuti oleh kecenderungan manusia untuk menoleh kebelakang, sehingga terdapat nilai-nilai tradisional atau daerah setempat di dalamnya (Jencks, 1991).

Dalam perkembangan arsitektur Post-Modern (pertengahan tahun 1960-an), terdapat 6 (enam) aliran yang muncul diantaranya, *Historicism, Contextualism, Straight Revivalism, Metaphor, Neo-Vernacular*, dan *Post Modern Space* (Jencks, 1984). Terdapat suatu bentuk yang mengacu pada istilah “bahasa setempat” dengan mengambil elemen-elemen arsitektur yang sudah ada ke dalam bentuk baru yang lebih modern disebut *Neo-Vernacular*.

Neo-Vernacular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, tata ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat (Tjok Pradnya Putra, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi arsitektur *Neo-Vernacular*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penerapan unsur budaya dan lingkungan setempat pada elemen fisik bangunan (zonasi, blockplan, detail, struktur, dan ornamen).
- b. Penerapan elemen non-fisik seperti budaya pola pikir, kepercayaan, dan tata letak yang mengacu pada makro kosmos. Elemen non-fisik ini biasanya diimplementasikan ke dalam konsep perancangan.
- c. Prinsip-prinsip bangunan vernakular tidak diterapkan secara murni, melainkan mengalami pengaruh perkembangan teknologi yang menghasilkan karya baru dengan mengutamakan penampilan visualnya.

2.3.2 Ciri-ciri arsitektur Neo-Vernakular

Menurut Charles Jencks dalam bukunya “*language of Post-Modern Architecture (1990)*”, terdapat beberapa ciri-ciri Arsitektur *Neo-Vernakular* (Jencks,1991) sebagai berikut:

- a. Menggunakan atap bubungan, atap memiliki tritisan yang memanjang ke arah permukaan tanah yang menutupi dinding, sehingga diiTengah kan sebagai elemen pelindung dan penyambut.
- b. Penggunaan batu bata.
- c. Menggunakan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.
- d. Kesatuan antara interior dengan ruang luar yang ada disekitarnya.
- e. Warna-warna yang kuat dan kontras.

2.3.3 Prinsip-prinsip perancangan Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur *Neo-Vernakular* memiliki beberapa prinsip-prinsip perancangan sebagai berikut:

- a. Hubungan Langsung, pembangunan kreatif serta adaptif terhadap arsitektur daerah setempat yang disesuaikan kepada nilai dan fungsi dari bangunan setempat.
- b. Hubungan Abstrak, meliputi interpretasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur.
- c. Hubungan Lansekap, merupakan hubungan dengan lingkungan sekitar seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim.
- d. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang.
- e. Hubungan Masa Depan, merupakan perancangan yang memiliki keberlanjutan atau bersifat sustainable dalam mengantisipasi kondisi yang akan datang.

2.3.4 Metode eksplorasi untuk pembaharuan dalam arsitektur *Neo-Vernacular*

Menurut Deddy Erdiono dalam Jurnal berjudul Arsitektur ‘Modern’ (*Neo Vernacular*) di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) pendekatan yang harus diperhatikan terkait dengan bentuk dan makna dalam merancang bangunan yang mengambil elemen-elemen fisik maupun non-fisik dari bangunan tradisional dalam konteks modern atau ke-kini-an (Erdiono, 2011) diantaranya sebagai berikut:

- a. Bentuk dan maknanya tetap, bentuk dan makna bangunan masih tetap. Bila ada sedikit perubahan dalam material penyusun bangunan itu masih diperbolehkan, sedangkan makna yang dimiliki masih sesuai dengan kosmologi, mitologi, dan genealogi yang ada
- b. Bentuk tetap dengan makna baru. makna yang diambil merupakan makna baru yang didapat dari adopsi budaya dan nilai-nilai asing seperti mengubah makna sakral menjadi makna profan dan juga menghilangkan mitos-mitos yang ada sebelumnya. Namun, bentuk bangunan tetap sama seperti sediakala
- c. Bentuk baru dengan makna tetap. maksudnya adalah sebuah makna lama yang masih sesuai dengan tradisi yang ada namun diinterpretasikan dengan cara yang baru
- d. Bentuk dan maknanya baru. bentuk dan makna baru biasa terjadi pada masyarakat yang berada pada masa pasca transisi yang mempunyai kebebasan untuk mengolah bentuk dan makna tanpa batasan konservatif yang mengikat

Pendekatan pada poin nomor 3 (tiga), arsitektur *Neo-Vernacular* dapat menghadirkan bentuk baru dalam pengertian unsur-unsur lama mengalami pembaharuan. Hal ini dapat disebabkan oleh penyesuaian terhadap kebutuhan pada masa kini maupun keinginan untuk melakukan transformasi bentuk pada bentuk lama, namun tidak lepas sama sekali dengan makna maupun unsur-unsur sebelumnya, sehingga tidak terjadi kejutan budaya (*culture shock*).⁸

2.3.5 Karakteristik Arsitektur *Neo-Vernakular*

Eva mendeskripsikan karakteristik dari Arsitektur *Neo-Vernacular* adalah sebagai berikut: (Eva Anggraini, April 2016)

- a. Bentuk bangunan. Atap, badan, dan pondasi bangunan pada bangunan *Neo-Vernacular* semuanya berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Perkembangan dapat dimulai dari segi bahan baku penyusun, system konstruksi, atau kebutuhan ruang.
- b. Warna. Biasanya, bangunan yang bergaya arsitektur *Neo-Vernacular* memilih warna-warna yang kontras hingga memberikan kesan yang dinamis untuk menarik pengunjung.
- c. Ornamen. Makna-makna filosofis yang mungkin masih ingin disampaikan dapat disimbolkan dengan ornamen-ornamen yang diletakan di dinding, list plang, kolom, dan tempat-tempat yang mudah terlihat lain nya.

2.4 STUDI PRESEDEN

2.4.1 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru

Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan perluasan dari sistem pelayanan terpadu dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dalam satu gedung dengan kondisi lahan rata, ketinggian tanah +0.30 m dengan luas tapak adalah 22.500m² atau 2.25 Ha. Dalam hal ini perencanaan Mall Pelayanan Publik “MPP” Kota Pekanbaru dianalisa dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur ekologi dengan dasar pertimbangan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna bangunan serta kesadaran akan pentingnya keberlangsungan ekosistem alam sekitar yaitu dengan memaksimalkan aliran angin dingin kedalam untuk menciptakan

⁸ Wicaksono, Muhammad Ramanindra, and Anisa Anisa. "Kajian Konsep Arsitektur Neo Vernacular Pada Desa Wisata Tamansari." *Journal of Architectural Design and Development (JAD)* 1.2 (2020): 111-124.

kenyamanan thermal didalam ruang dengan penerapan *cross ventilation* dan *Inner courtyard* pada bangunan.



Gambar 2. 1 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru

Penerapan prinsip *eco-design* diartikan segala bentuk dari desain yang meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan dengan cara mengintegrasikan proses kehidupan dengan mengupayakan untuk menciptakan rancangan dengan ekosistem alami yang meminimalkan dampak negatif kepada alam. Prinsip penerapannya ialah dengan menciptakan bangunan hemat energi, memanfaatkan kondisi dan sumber daya alam yang tersedia seefisien mungkin, tanggap terhadap tapak pada bangunan, memperhatikan pengguna bangunan, meminimalisir penggunaan sumber daya terbarukan dan holistik



Gambar 2. 2Desain Mall Pelayanan Publik Pekanbaru

Penerapan penerapan prinsip arsitektur ekologi pada bangunan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru diharapkan memberikan rancangan dengan ekosistem alami

yang merespon iklim tropis dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, sehingga menjaga harmonisasi antara pengguna dan lingkungannya.

2.4.2 Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta

Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta merupakan salah satu bangunan yang mengadopsi gaya arsitektur *Art Deco-Kolonial* yang mana dialihfungsikan sebagai Mall Pelayanan Publik guna mempermudah penyelenggaraan layanan publik dan administrasi di Kota Surakarta dalam satu bangunan. Awalnya, gedung tersebut sempat direncanakan sebagai kantor Dinas Pariwisata dan kantor Dinas Kebudayaan, namun Wali Kota Surakarta meminta gedung tersebut dialihfungsikan menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP).



Gambar 2. 3 Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta

Lokasi MPP berada tepat di selatan tapak *Tourism Information Park* yang mana 83 perencanaan fungsi baru diharapkan dapat saling terintegrasi, mendukung dan melengkapi satu sama lain. *Tourism Information Park* sebagai fungsi dan fasilitas publik baru untuk mendukung pariwisata budaya di Kota Surakarta dirancang dengan menyesuaikan regulasi yang ada serta terintegrasi dengan fungsi eksisting di sekitarnya. Kawasan Benteng Vastenburg diapit oleh 4 jalan di kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya dengan luas sekitar 56.187 m² ini memiliki beberapa fungsi pada tiap bagian lahannya, antara lain diperuntukan sebagai Kawasan Wisata Kuliner dan Wisata Kuliner Malam 'Galabo', Area Komersial, RTH berupa hutan kota, serta lahan eks-KCP Bank Danamon yang akan dialihfungsikan menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP).



Gambar 2. 4 Desain Interior MPP Kota Surakarta

Dalam hal ini Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta akan melayani berbagai macam pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan hingga 85 pembuatan SIM, maupun dokumen imigrasi. Bangunan tersebut direnovasi sesuai kebutuhan dan ditambahkan loket-loket untuk beberapa instansi yang menyediakan layanan dan tersebar di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 3 akan digunakan sebagai kantor BPMPTSP, sedangkan lantai basement direncanakan sebagai ruang genset dan ditambahkan fasilitas pendukung seperti ruang bermain anak, ruang laktasi, dan sebagainya.

Pada sisi utara lahan terdapat area parkir yang dipakai untuk kerjasama Pemerintah kota Solo dengan pihak ketiga, sedangkan sisi selatan dikembangkan sebagai kawasan kuliner 'Galabo'. Selain itu, bangunan MPP rencananya diintegrasikan dengan kawasan sekitar guna menambah unsur estetika dengan pembongkaran pagar di sekeliling bangunan agar terkesan lebih menyatu dengan Benteng *Vastenburg* dan 'Galabo'.

BAB III

METODE PERANCANGAN

3.1 IDE PERANCANGAN

Mall Pelayanan Publik “MPP” merupakan salah satu bangunan yang cukup penting dalam ranah kehidupan masyarakat yang mana didalam bangunan tersebut terdapat beberapa hal yang menyangkut segala macam bentuk kebutuhan maupun keperluan yang berkaitan dengan pelayanan. Di dalam Mall Pelayanan Publik “MPP” tersebut tentu saja melibatkan banyak pihak terlebih layanan yang terdapat di instansi pemerintah mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, pajak, retribusi, aduan maupun konsultasi dengan tujuan tidaklah lain untuk memberikan pelayanan yang cepat, dan terbaik untuk masyarakat.

Dua faktor utama di dalam konsep perencanaan pencahayaan adalah (1) tingkat kekuatan penyinaran (*quantity*) dan (2) pengontrolan silau (*quality*). Selain itu unsur luar yang turut mempengaruhi kenyamanan pandangan yang harus diselesaikan secara teknis adalah wujud obyek yang di pandang, latar belakang obyek dan kondisi fisiologis mata. Pada hakikatnya, konsep perencanaan pencahayaan adalah pengaturan efek sinar yang sesuai terangnya dan tidak menyilaukan, sehingga kenyamanan dapat tercapai.

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah pada perancangan mall pelayanan publik “MPP” ini adalah dengan mengkaji masalah yang ada pada mall pelayanan publik kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Minimya vegetasi
2. Penggunaan ruang yang tidak semestinya
3. Belum optimalnya pelayanan MPP
4. Tidak adanya *shadding* pada bukaan
5. Minimnya SRP pada site tersebut

3.3 PENGUMPULAN DATA

Penulis memperoleh data dari berbagai macam sumber dengan Teknik pengumpulan data yang beragam di antaranya :

1. Analisis site

Berisi tentang potensi dan juga permasalahan permasalahan yang ada di site, kemudian di klasifikasikan dan di carikan solusi untuk meeminimalisir permasalahan tersebut. Analisis yang ada meliputi batas site, iklim, topografi, sirkulasi, dan kontur tanah yang nantinya akan tau area yang di jadikan *cut and fill*.

2. Analisis konsep bangunan

Berisi tentang konsep arsitektur seperti apa yang nantinya akan di gunakan, mulai dari konsep bangunan, pendekatan kebudayaan lokal setempat, interior, kebutuhan SRP dan kebutuhan RTH.

3. Analisis pengguna

Berisi tentang identifikasi siapa saja yang nantinya akan menggunakan bangunan, dan juga menjelaskan aktivitas dan kegiatan apa saja yang nantinya akan di lakukan oleh pengguna.

4. Analisis ruang

Berisi tentang ruang apa saja yang nantinya akan di butuhkan di bangunan, setelah mengetahui aktivitas atau kegiatan yang di lakukan oleh pengguna. Nantinya juga berisi analisis besaran ruang dan kebutuhan ideal atau asumsi ruangan tersebut.

5. Analisis bentuk

Berisi tentang bagaimana bentuk dari bangunan nantinya, mulai dari fasad bangunan dan *landscape* bangunan yang nantinya akan berkaitan langsung dengan kondisi site.

6. Analisis struktur

Berisikan tentang jenis struktur apa yang nantinya akan di gunakan pada bangunan sehingga nantinya akan mempermudah pengguna bangunan untuk mencapai kenyamanan, keselamatan, Kesehatan, kemudahan komunikasi, serta mobilisasi antar ruang.

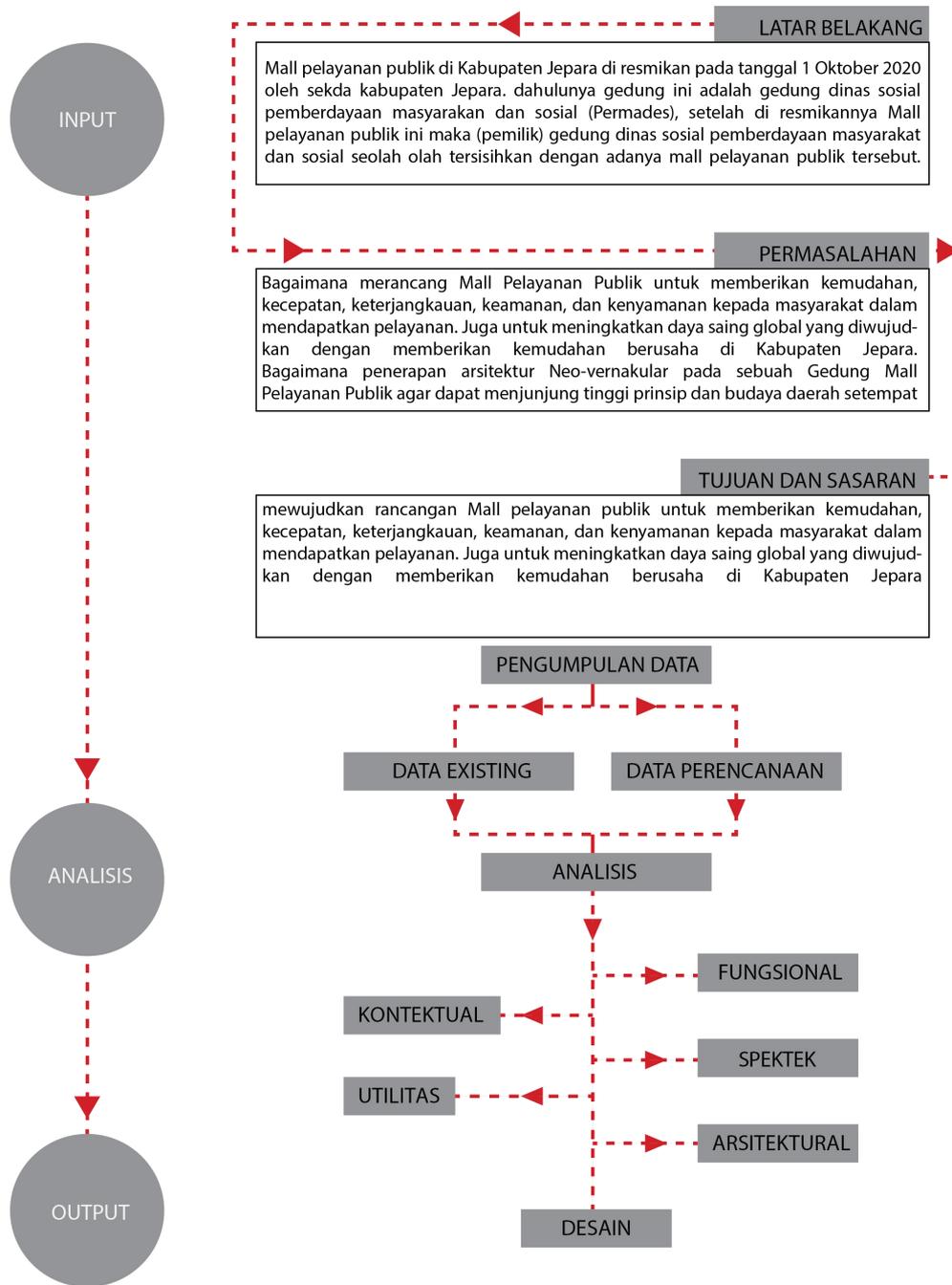
7. Analisis aksesibilitas dan sirkulasi

Berisi tentang bagaimana akses jalan menuju bangunan, untuk standar kebutuhan mobil pemadam kebakaran agar akses tersebut jika terjadi hal yang tidak diinginkan diharapkan mobil tersebut bisa melalui akses tersebut dengan mudah.

8. Analisis utilitas

Berisi tentang sistem utilitas apa saja yang nantinya akan di gunakan, dengan adanya kelengkapan ini, maka sebuah bangunan akan menghasilkan manfaat yang meliputi kenyamanan, Kesehatan, aksesibilitas, komunikasi, mobilitas dan bangunan.

3.4 ALUR POLA PIKIR



Gambar 3. 1 Gambar Alur pikir

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISA FUNGSIONAL

4.1.1 Program ruang

Standar Besaran ruang berdasarkan :

1. Ernst Neufert, Data Arsitek (DA)
2. *Time saver standars building standars for building* (TSS)
3. Permen No.50 tahun 2011 Tentang Sarana Prasarana Kantor.

SERVICE					
NO	JENIS RUANG	JUMLAH RUANG	STANDART	LUAS TOTAL	SUMBER
1.	Toilet pria	12Unit + 4 Difable + 12 urinoir	2m ² / lavatory, 0,8m ² / urinoir, 0,9m ² / wastafel	16,5m ²	DA
2.	Toilet Wanita	12Unit + 4 Difable + 12	2m ² / lavatory, 0,8m ² / wastafel	16,5m ²	DA
3.	Mushola	1 unit	20 m ²	58m ² CE/CO	DA
4.	Lift	4 unit	2,5 m ² /unit	3,8m ²	SNI
5.	Tangga darurat	2 unit	9,2 m ²	17m ²	DA
6.	Gudang peralatan	4 unit	9 m ²	9m ²	DA
7.	Janitor	4 unit	3 m ²	5m ²	DA
8.	Ruang ME	1 unit	4 m ²	10m ²	DA
9.	Ruang CCTV	4 unit	4m ² /orang	12m ²	DA

Tabel 4.1 Program ruang service

PELAYANAN PUBLIK					
NO	JENIS RUANG	JUMLAH RUANG	STANDART	LUAS TOTAL	SUMBER
1.	Dinas komunikasi dan informatika	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
2.	Dinas sosial	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
3.	Dinarpusda	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
4.	Perpajakan	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
5.	BPN	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
6.	PLN	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
7.	Diskopukmnake rtrans	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN

8.	BP2MI	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
9.	Disperindag	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
10.	Kejaksaan negeri	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
11.	DPUPR	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
12.	BPPKAD	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
13.	Notaris	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
14.	DPMPTSP	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
15.	Pengadilan agama	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
16.	Pengadilan negeri	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
17.	Samsat	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
18.	Disdukcapil	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
19.	BPJS Kesehatan	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
20.	BPJS Ketenagakerjaan	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
21.	Kemenag	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
22.	PDAM	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
23.	Unit layanan pegadaian	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
24.	Polres	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
25.	Dinas perhubungan	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
26.	KP2KP	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
27.	Pelayanan VVIP	1 unit	9 m ²	12m ²	PERMEN
28.	Pelayanan mandiri	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
29.	Booth pendaftaran	1 unit	4 m ² /orang	12m ²	PERMEN
30.	Pengaduan	1 unit	1 m ² /orang	12m ²	PERMEN
31.	informasi	1 unit	9 m ²	12m ²	PERMEN

Tabel 4. 2 Program ruang pelayanan publik

PENGELOLA					
NO	JENIS RUANG	JUMLAH RUANG	STANDART	LUAS TOTAL	SUMBER
1.	Ruang Kepala DPMPTSP	1 unit	17m ²	38m ²	PERMEN
2.	Ruang sekretaris	1 unit	17 m ²	26m ²	PERMEN
3.	Ruang kasubag program	1 unit	17 m ²	26m ²	PERMEN
4.	Ruang kasubag keuangan	1 unit	17 m ²	26m ²	PERMEN
5.	Ruang kasubag umum	1 unit	17 m ²	26m ²	PERMEN

6.	Ruang kabag bidang perencanaan <ul style="list-style-type: none"> - Seksi perencanaan PM - Seksi pengembangan iklim PM - Seksi promosi PM 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN
7.	Ruang kabag pengendalian <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pemantauan - Seksi pembinaan - Seksi pengolahan data 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN
8.	Ruang kabag penyelenggaraan A <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pelayanan perijinan C/I - Seksi pelayanan perijinan C/II - Seksi pelayanan perijinan C/III 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN
9.	Ruang kabag pengelenggaraan B <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pelayanan perijinan C/I 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN

	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi pelayanan perijinan C/II - Seksi pelayanan perijinan C/III 				
10.	Ruang kabag penyelenggaraan C <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pelayanan perijinan C/I - Seksi pelayanan perijinan C/II - Seksi pelayanan perijinan C/III 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN
11.	Ruang kabag pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pengaduan - Seksi kebijakan - Seksi pelaporan 	1 unit	5,5 m ² /orang	33m ²	PERMEN
PENUNJANG					
1.	Ruang rapat besar	1 unit	40 m ²	65m ²	PERMEN
2.	Ruang rapat kecil	1 unit	25 m ²	30m ²	DA
3.	Pantry	3 unit	9 m ²	12m ²	DA
4.	Ruang tamu	1 unit	1,2 m ² /orang	20m ²	DA
5.	Gudang	2 unit	9 m ²	9 m ²	DA
6.	Ruang laktasi	3 unit	6 m ²	23m ²	DA

Tabel 4. 3 Program ruang pengelola

4.2 ANALISA KONTEKSTUAL

4.2.1 Pemilihan site



Gambar 4. 1 Pemilihan site

Luas lahan : 18.699 m²

1. Batas – Batas tapak

- Utara : Hotel Kalingga Star
- Selatan : Inspektorat Kabupaten Jepara
- Timur : Perpustakaan daerah & Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- Barat : Hotel Syailendra

2. Potensi Tapak

- Site yang mudah terjangkau dikarenakan berada di titik pusat kota disamping itu dekatnya dengan beberapa fasilitas sebagai penunjang dalam perancangan tapak dimana nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut.
- Luasan tapak sekitar kurang lebih 18.699 m² sesuai dengan ketentuan pada RDTR Kabupaten Jepara, menetapkan bahwa peraturan pada lokasi jalan HOS. Cokroaminoto adalah sebagai berikut :
 - KDB : 60%
 - KLB : 0,3 - 4
 - GSB : 15 Meter

Dari ketentuan peraturan pemerintah diatas, maka koefisien dasar banunan(KDB) SEKITAR Kurang lebih 11.219 m², garis sempadan bangunan 15 meter.

4.2.2 Analisa site

a. Aksesibilitas

Lokasi site dengan ruang-ruang yang penuh tentu saja membutuhkan ruang korelasi dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama bagi pejalan kaki. Maka dari itu, trotoar sepanjang Jalan akan tetap di pertahankan dan didukung dengan melakukan penghijauan agar memberikan rasa nyaman terkhusus bagi pejalan kaki.

b. Sirkulasi

Untuk akses masuk dan keluar kawasan akan di pisah dengan jalur yang berbeda, hal ini dikarenakan agar pengguna kendaraan dapat mengelilingi kawasan tersebut serta mengenal lebih dekat area site. Dan untuk pejalan kaki sendiri akan di berikan fasilitas *sitting area* pada *point of view* agar tercipta rasa aman serta nyaman bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut.

c. Vegetasi

Minimnya vegetasi pada area site tersebut. Oleh sebab itu, pada kawasan tersebut ditanami beberapa tanaman yang mana tidaklah lain untuk memfilter polusi udara, meminimalisir kebisingan pada area site dan disisi lain juga untuk memberikan kenyamanan termal pada kawasan tersebut.

1. Tumbuhan peneduh atau pengatap. Misalnya pohon ketapang kencana, pohon cemara, pohon palem, pohon flamboyan, pohon kersen.



Gambar 4. 2 Pohon ketapang kencana



Gambar 4. 3 Pohon cemara



Gambar 4. 4 Pohon flamboyan



Gambar 4. 5 Pohon kersen



Gambar 4. 6 Pohon Parahyba

2. Tumbuhan pengarah. Misalnya palem raja dan sikat botol.



Gambar 4. 7 Pohon Palem raja



Gambar 4. 8 Tumbuhan sikat botol

3. Tanaman hias. Misalnya aglaonema, philodendron, monstera, homalomena, keladi dll.



Gambar 4. 9 Tanaman aglaonema, keladi, homalomena

- d. View

Untuk view luar sendiri hanya bisa di nikmati area luar saja atau fasad. Akan tetapi, untuk view dalam akan di maksimalkan semaksimal mungkin yaitu pada

bagian *point of view*, seperti *volliage* sebagai *shadding*, kemudian *Reflection poll* untuk membiaskan sinar matahari, disamping itu juga memberikan *sequences* serta rileks ruang agar pengunjung dengan adanya ruang terbuka dapat merasa bebas hijau.

e. Orientasi matahari

Desain Bangunan dengan menghadap selatan mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memaksimalkan bukaan serta memberikan *skylight* untuk taman indoor dengan tujuan agar dapat memberikan pencahayaan alami, kemudian untuk bangunannya sendiri menggunakan sistem smart energi.
2. Memberikan *shadding* dengan menggunakan *volliage*. Hal ini dimaksudkan untuk menambah sirkulasi udara/penghawaan serta untuk mengurangi udara kotor yang masuk disebabkan polusi dari luar bangunan
3. Menggunakan material seperti *glass block sandblast* maupun *clear*, yang mana dari material-material tersebut dapat memberikan *Re-flection* dan *Refraction* pada bangunan mencapai dengan standar *lux* baca yaitu 300 *lux*

f. Penghawaan

Penggunaan ruang semi *outdoor* dan bukaan yaitu *cross ventilation* dimaksudkan agar dapat memaksimalkan sirkulasi udara "penghawaan" dari luar agar dapat masuk kedalam bangunan. Kemudian *shadding volliage* juga sangat berpengaruh untuk menciptakan serta memberikan oksigen yang bagus. Untuk meredam panas dari sinar matahari dalam hal ini menggunakan "*Reflection poll*" agar penguapan dari air tersebut dapat memberikan efek sejuk pada sekitar area tersebut.

g. Kebisingan

Untuk meminimalisir kebisingan yang terjadi dari arah selatan yaitu jalan raya dalam hal ini solusi yang dapat diterapkan dengan memberikan tanaman-tanaman penghalang misalnya tanaman perdu, pucuk merah, ketapang dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian barat cukup memberikan pembatas saja yaitu pagar disertai penanaman tanaman hias pada area sitting area dengan tujuan agar para pengunjung tetap bisa menikmati kawasan tersebut.

4.3 ANALISA SPESIFIKASI DAN TEKNIS

NO	KOMPONEN	URAIAN PEKERJAAN	MATERIAL	SPESIFIKASI
1.	Pekerjaan Tanah	Pengurugan 1m ³ Dengan Tanah Urug	• Tanah Urug	• Tanah Urug : lokal
2.	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m ³ beton (K 250)	• PC • Pasir Muntilan (quarry – lokasi pekerjaan), • Batu Pecah	• PC : Tigaroda, dinamyx, Gresik, Bima • Pasir dan batu : lokal
3.	Pekerjaan Beton	Pembesian	• Besi Polos • Besi Ulir	• Besi : Master Steel (MS), Lutan Steel (LS), Perwira
4.	Pekerjaan Beton	Bekisting 2x Pakai	• Kayu Sengon Laut & Balok Kayu Klas II	• Kayu : lokal
5.	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan 1m ² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP	• PC • Pasir Pasang • Bata Merah 5x11x22 cm	• PC : Tigaroda, dinamyx, Gresik, Bima • Pasir : lokal • Batu Merah : lokal
6.	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	• PC • Pasir Muntilan (quarry – lokasi pekerjaan)	• PC : Tigaroda, dinamyx, Gresik, Bima • Pasir : lokal
7.	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan 1 m ² acian.	• PC	• PC : Tigaroda, dinamyx, Gresik, Bima
8.	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan 1 m ² skoning 1SP : 2PP	• PC	• PC : Tigaroda, dinamyx, Gresik, Bima

				Pasir : lokal
9.	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan Glassblock	Glassblock 24x24 sandblast x Clear	Ex. mulia
10.	Pekerjaan Pengecetan	Pengecetan tembok Pengecetan Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Cat tembok • Cat besi 	<ul style="list-style-type: none"> • Cat : Avitex, Jotun, Catylac, Decolith • Compon :Elephant, Aplus
11.	Pekerjaan Besi IWF	Pemasangan Besi IWF	WF 200.100,5,5.8	• Besi IWF
12.	Pekerjaan pemasangan conwood	Pemasangan conwood	conwood	<ul style="list-style-type: none"> • conwood lebar 30cm • conwood tebal 2.5cm • deck 12” D3

Tabel 4. 4 Analisa spesifikasi dan teknis

A. Pekerjaan Beton

Membuat 1 m³ beton mutu K-250 – K300

B. Lingkup Pekerjaan :

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- b. Pekerjaan beton bertulang meliputi seluruh pekerjaan beton bertulang seperti yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Panitia/Pejabat dan Pengawas lapangan.

C. Persyaratan Bahan :

1. Semen portland harus memakai mutu yang terbaik dari satu jenis merk atas persetujuan panitia/pejabat dan pengawas lapangan. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan semen portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban,

bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan tumpukan sesuai dengan syarat penumpukan semen.

2. Pasir muntulan Pasir harus berkualitas baik dengan diameter maksimum 2.00 mm. Pasir diupayakan selalu bersih, keras, padat, tidak tercampur batu pecah dan harus bebas dari banyak kotoran lempung, lanau dan bahan kimia lain yang dapat mempengaruhi kekuatan spesi. dalam hal ini pasir menggunakan pasir ex merapi
3. Batu pecah Digunakan koral yang bersih, bermutu baik, tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan/ penimbunan pasir koral beton harus dipisahkan satu dari yang lain hingga kedua bahan tersebut dijamin mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.
4. Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton.

D. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan :

a. Cetakan *begisting*

- 1) Acuan harus dibuat dan direncanakan begitu rupa sehingga beton dapat dengan baik ditempatkan dan dipadatkan, tidak terjadi perubahan bentuk acuan selama pembetonan dilaksanakan maupun terhadap pengerasan beton.
- 2) Acuan harus juga cermat dalam kedudukan dan datar, untuk jenis acuan-acuan tertentu, terlebih dahulu Pemborong harus menyerahkan perencanaan gambar acuan tersebut kepada tim teknis/PPKom, bila perlu harus dilengkapi perhitungan dan detail-detail yang jelas. Bilamana hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari tim teknis/PPKom, rencana acuan tersebut dapat dilaksanakan.
- 3) Sesuai dengan persyaratan betonnya acuan dapat menggunakan papan-papan atau kayu lapis/multipleks 18mm dengan penguat dari balok 6/8, 5/7 atau konstruksi *form work* yang lazim digunakan.
- 4) Perlu ditekankan bahwa tanggung jawab keamanan konstruksi terletak pada Pelaksana, Pelaksana harus meminta ijin tim teknis/PPKom dan Pengawas

lapangan bilamana ia bermaksud akan membongkar pada bagian konstruksi utama.

- 5) Khusus pembuatan begisting untuk permukaan beton yang tidak perlu dilapisi plesteran (dinding *graving dock*), maka dapat dibuat cetakan harus dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Cetakan dapat digunakan secara berulang dengan catatan hanya cetakan yang bermutu baik boleh dipakai yang telah disetujui oleh tim teknis/PPKom dan Pengawas lapangan.
 - b) Permukaan cetakan harus dibasahi dengan minyak (*form oil/mould release agent*) yang bermaksud untuk menghasilkan permukaan beton yang bersih, halus dan bebas kotoran dan kemudahan pada saat pembukaan/ pembongkaran bidang-bidang begisting.
 - c) Segala cacat pada permukaan beton yang telah dicor harus ditambal (diplester) sedemikian rupa hingga sesuai warna/texture permukaan disekatnya.

b. Pemberitahuan Tentang Pelaksanaan Pengecoran

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama dari pekerjaan, Pelaksana harus memberitahukan Tim teknis/PPKom dan Pengawas lapangan untuk mendapat persetujuan, hal ini dapat dilaksanakan dengan Berita Acara Pengecoran. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan semestinya atau persiapan pengecoran tidak disetujui oleh tim teknis dan Pengawas lapangan, maka mungkin Penyedia jasa diperintahkan untuk menyingkirkan beton yang baru dicor atas biaya Penyedia jasa.
2. Sebelum pengecoran dimulai, Penyedia jasa harus sudah menyiapkan seluruh stek-stek maupun anker-anker yang diperlukan, pada kolom-kolom, balok-balok beton yang akan dihubungkan dengan dinding dan kecuali dinyatakan lain pada gambar-gambar, maka stek-stek dan anker-anker dipasang setiap jarak 1,00 m. Beton yang mengeras, kotoran kotoran dan bahan-bahan lain harus dibuang dari dalam bekisting, mesin pengaduk (beton molen) maupun alat-alat pembawa.

3. Penulangan harus dimatikan pada posisinya, diperiksa sebelum pengecoran dilakukan, agar pemeriksaan dan persetujuan dapat diberikan pada waktunya.

c. Kelas dan Mutu beton

Kecuali dinyatakan lain, maka campuran dari beton harus mencapai kekuatan tekan beton, karakteristik yang penggunaannya sebagai berikut:

1. Beton dengan mutu Bo untuk pekerjaan non-struktural seperti lantai kerja (*work floor*).
2. Beton dengan mutu K-250

d. Cara Pengadukan

1. Cara pengadukan Boleh manual atau menggunakan beton molen.
2. Takaran untuk semen portland, pasir dan koral harus disetujui terlebih dahulu oleh Tim Teknis/PPKom dan Pengawas lapangan.
3. Selama pengadukan, kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran baru. Pengujian *slump* minimum 5 cm dan maksimum 10 cm.

e. Pengecoran Beton

1. Kontraktor diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran dan ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak.
2. Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Tim Teknis/PPKom dan Pengawas lapangan.
3. Pengecoran harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang koral/split yang dapat memperlemah konstruksi.

4. Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Pengawas Lapangan.

f. Pengujian

1. Sebelum melaksanakan pengecoran awal, kontraktor harus mengadakan *mix design* yang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang disyaratkan dapat tercapai dari *mix design* tersebut, selanjutnya oleh Tim Teknis/PPKom dan Pengawas lapangan akan dihitung karakteristik dari hasil percobaan tersebut yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menilai mutu beton
2. Pada pekerjaan beton struktural untuk waktu permulaan pelaksanaan dibuat 1 (satu) benda uji untuk setiap 3 m³ beton dan dalam waktu sesingkat-singkatnya harus segera terkumpul 20 benda uji, sedang setelah berjalan lancar diperlukan 1 (satu) benda uji pada setiap 5 m³ beton dengan minimum 1 benda uji untuk setiap harinya.
3. Apabila hasil pemeriksaan pada benda uji masih meragukan, maka pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan menggunakan *hammer test*.
4. Beton yang dikerjakan Penyedia/Pelaksana harus sesuai dengan mutu beton yang disyaratkan. Apabila dalam pelaksanaan mutu beton tidak tercapai sesuai yang disyaratkan, maka Penyedia/Pelaksana harus bertanggung jawab.
5. Pembuatan dan pemeriksaan benda-benda uji harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Pasal 4.9 PBI 1971 dan semua biaya yang timbul akibat pengujian yang tercantum pada ayat ini adalah menjadi tanggung jawab kontraktor.
6. Slump yang diijinkan untuk beton dalam keadaan *mix* yang normal adalah 10±2 cm, pemakaian slump harus teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk daerah daerah yang pembesiannya rapat dapat dipergunakan slump yang tinggi.

7. Standar Rujukan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemasangan Batu.
- b. Peraturan Beton Indonesia 1971.

4.4 ANALISA ASPEK KINERJA (UTILITAS)

Pendekatan dalam perencanaan dan perancangan dari pada konsep utilitas adalah secara integral upaya mencapai sasaran-sasaran dalam beberapa hal antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik, pengelola dan pemakai bangunan.
2. Memenuhi kebutuhan secara maksimal/optimal perubahan-perubahan dan fleksibilitas daripada bangunan, termasuk kemungkinan Perencanaan secara bertahap.
3. Mendapatkan/menentukan sistem, instalasi, kapasitas unit dan type alat/mesin sedemikian rupa sehingga didapatkan optimasi dari biaya investasi dan operasional dalam mendapatkan "*Cost Effectiveness*".
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan kenyamanan, *safety*, *security*, serta persyaratan/peraturan-peraturan yang berlaku dan kriteria perencanaan.
5. Memenuhi standard umum *engineering* dan memenuhi peraturan-peraturan Kabupaten Jepara.

Menyangkut kepada sistem mekanikal dan elektrikal dalam kaitannya sebagai prasarana bangunan, secara global dapat disebutkan hal-hal yang patut mendapat perhatian. Tuntutan kebutuhan ataupun yang dijadikan tolok ukur di dalam perhitungan-perhitungan, analisa serta perancangan dikaitkan kepada aplikasi teknologi mutakhir disebutkan sebagai 'Demand'/Tuntutan kebutuhan, antara lain :

- a) Demands prasarana fisis: Akustik Ruangan; *Glaring and Sunshading*; *Level of Back Ground Noises*.
- b) Demands terhadap kondisi sekitar: Temperatur ruangan; Radiasi panas; Kelembaban; Ventilasi mekanis; Kecepatan udara/air speed.
- c) Demands terhadap instalasi mekanikal: *Sunshade and facade cleaning*.
- d) Demands terhadap instalasi kelistrikan: Konsumsi daya listrik,, Transformator; Panel distribusi, kabel shaft, *Emergency power system*, Instalasi penerangan/illuminasi, Penangkal petir dan pencegahan tegangan lebih.

- e) Demands terhadap '*Safety and Security Instalation*': *Fire Detection and Extinguishing, Public Evacuation and Alarm Communication, Parking control.*
- f) Demands terhadap "*Office Automation*": *Work Station, Flexibility, raised floor, floor trunking, vertical shaft, Komunikasi telepon; Local Area Network.*

4.4.1 Sistem mekanikal

A. Sistem Sirkulasi Udara yang baik, dan Ventilasi Mekanik

1. Pertimbangan Sistem

Sistem Tata Udara yang diterapkan untuk pengkondisian udara Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik Jepara ini mengacu pada fungsi dan waktu pemakaian ruang-ruang yang dikondisikan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem utilitas yang mudah dan rendah, kemudahan di dalam pengawasan terhadap operasional system, pertimbangan aspek arsitektur, interior dan struktur, sistem yang dapat dikontrol secara individu, biaya investasi dan operasional yang rendah.

2. Usulan Sistem Tata Udara

Banyak terdapat alternatif Sistem Tata Udara (Sistem AC) yang dapat diterapkan untuk pengkondisian udara pada bangunan. Sistem split AC mempunyai keunggulan yang paling menonjol adalah dalam hal biaya investasinya yang rendah, mudah dimati-hidupkan secara individu dan lebih mudah mendapatkan suku cadang, sedangkan titik lemah dari sistem ini adalah usia pakai dan tingkat keandalannya yang relatif rendah serta fleksibilitas pengembangannya cukup sulit. Namun demikian sistem ini dapat di tingkatkan performansinya bila didukung oleh aspek arsitektur, misalnya *outdoor* unit diberikan tempat khusus sehingga jarak antara Outdoor dan Indoor berdekatan dan memudahkan dalam pemeliharaan dan service.

3. Ventilasi Mekanis

- a. *Toilet Exhaust* Tiap-tiap toilet di setiap lantai dilengkapi dengan *Exhaust Fan*, dimana udara dibuang langsung ke bagian sisi atas bangunan. *Ventilation Rate dari Public Toilet* adalah 10 – 15 Air Change per Hour.



Gambar 4. 10 Exhaust Fan

- b. *Exhaust Air* untuk Ruang Lain. Ruang-ruang lain yang membutuhkan pergantian udara antara lain adalah Ruang Pompa, Ruang Panel and Transformer, dan lain-lain. Seluruh ruangan tersebut akan dilengkapi dengan sistem *exhaust/intake*.



Gambar 4. 11 Exhaust air

B. Sistem *plumbing* (distribusi air bersih, pembuangan air kotor, bekas & air hujan, sistem drainase)

1. Distribusi Air Bersih

Air merupakan sumber pokok kehidupan manusia, demikian pula dalam kegiatan kanto. Sumber air dapat berupa air PDAM, air tanah dalam, atau air tanah dangkal. Air harus memenuhi standart kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/PER/IX/1990. Sistem distribusi dalam perencanaan ini yaitu: Air dari reservoir bagian bawah (GWT) di transfer dengan menggunakan pompa *delivery* ke *reservoir* bagian atas pada lantai atap bangunan, Air dari *reservoir* atas didistribusikan ke setiap alat Plambing dari lantai atas

kebawah melalui pipa induk dan cabang dengan sistem gravitasi. Sedangkan untuk lantai atas pendistribusian air bersih dilakukan dengan bantuan pompa booster.

2. Pembuangan Air Kotor dan Air Bekas

Sistem pembuangan digunakan sistem terpisah antara pipa pembawa air buangan dari wastafel dan *floor drain* dengan pipa pembawa air buangan dari closet dan urinal pada pipa cabang setiap daerah basah maupun pipa induk dalam shaft. Tekanan buang sampai dengan sistem pengolahan akhir dengan sistem gravitasi. Selain itu digunakan sistem pemompaan untuk pembuangan air kotor ke sistem pengolahan akhir (STP) pada pelayanan daerah basah lantai satu.

Dalam memperhitungkan beban air kotor dari suatu bangunan dapat diperhitungkan berdasarkan: Jumlah populasi dan Jumlah *sanitary fixtures* yang diukur berdasarkan nilai *fixtures* unit. Dalam memperhitungkan jumlah *sanitary fixtures* diperhitungkan berdasarkan tabel kebutuhan *sanitary fixtures* dengan ratio populasi untuk jenis bangunan sesuai dengan Peraturan Plumbing Indonesia.

3. Sistem Drainase

Mengingat luas bangunan beserta luas halaman cukup besar dan pemikiran untuk menyalurkan/pembuangan air akibat hujan, perlu dibuatkan sistem saluran pembuangan (drainasi) yang optimal, sehingga tidak mengalami genangan air/banjir.

Layout saluran yang direncanakan di halaman gedung berdasarkan dari beberapa hal antara lain: Kondisi perencanaan site plan dari arsitek, Kondisi level tanah yang direncanakan (peil banjir), Lokasi saluran induk yang telah ada. *Type* dari saluran yang direncanakan disesuaikan dengan lokasi di mana saluran dibuat. Maka *type* saluran terdiri dari: Saluran tertutup dari konstruksi beton, Saluran terbuka, Saluran dengan tutup grill saluran tegak berupa pipa.



Gambar 4. 12 Sistem saluran pembuangan (drainasi)

C. Sistem Pemadam Kebakaran (*Hydrant and Sprinkler*) dan *Fire Extinguisher*

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bangunan ini akan dilengkapi dengan peralatan kebakaran *Fire Extinguisher* (Alat Pemadam Api Ringan)



Gambar 4. 13 Fire Extinguisher dan Hydrant and Sprinkler

4.4.2 Sistem elektrik

Sistem kelistrikan (penyediaan dan distribusi daya listrik, penerangan listrik dan lain-lain termasuk sistem penangkal petir).

1. Konsep Perencanaan Sistem Listrik

Sistem listrik ini akan dirancang agar mempunyai tingkat keandalan yang tinggi pada pelayanan, kualitas yang memenuhi standard, kecepatan dan kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan, biaya operasional yang rendah, aman terhadap penghuni dan gedung serta mengantisipasi perkembangan beban di masa yang akan datang. Sistem listrik ini akan meliputi sistem-sistem: Sumber daya listrik PLN, Sumber daya listrik cadangan (*emergency*) berupa

diesel generating set, Sistem distribusi daya listrik ke beban-beban, Sistem penerangan umum (*general lighting*) dan darurat (*emergency lighting*), Sistem kotak-kontak biasa dan daya, Sistem pentanahan (*grounding system*), Sistem penangkal petir.

2. Kriteria Perancangan

Kebutuhan daya berdasarkan standard dan peraturan yang ada, maka diambil kriteria perencanaan dalam perhitungan beban listrik untuk tiap area: Public Area (25 VA/m²) dan Kantor (40 VA/m²). Sedangkan beban total kebutuhan daya gedung adalah sebesar 125 – 150 VA/m². Kriteria tingkat penerangan direncanakan berdasarkan standar Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan (DPMB) dan IES. Kuat penerangan yang direncanakan adalah: Ruang/ Kantor (300 - 500 lux) dan Koridor (100 - 150 lux).

3. Pembagian Beban Listrik Didalam perancangan yang akan dilakukan

Beban listrik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a) Beban normal, yaitu beban yang akan dilayani khusus dari PLN secara terus menerus selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu dan bila PLN padam beban ini akan mati (sebagian penerangan, sebagian kotak-kontak dan sebagian AC).
- b) Beban *emergency*, yaitu beban yang akan dilayani oleh PLN dan bila PLN padam beban akan dilayani oleh genset (sebagian penerangan, sebagian kotak-kontak, sebagian AC, pompa air, lift penumpang, ventilasi).
- c) Beban khusus (*priority*), yaitu beban yang akan dilayani oleh PLN dan bila PLN padam beban akan dilayani oleh genset. Pada saat transisi, di mana genset belum masuk, beban akan dicatu oleh Uninterruptible *Power Supply* (UPS) (peralatan operasi).
- d) Beban kebakaran, yaitu beban yang akan dilayani dari PLN secara terus menerus selama 24 jam per hari dan 7 hari per-minggu termasuk dalam keadaan kebakaran dan bila PLN padam beban akan tetap dilayani oleh genset (pompa kebakaran, *presurisasi fan, fire alarm*).

4. Penyediaan Sumber Daya

Estimasi total kebutuhan daya listrik bangunan ini adalah sebesar jumlah bangunan yang akan direncanakan. Sehingga tipe langganan PLN yang akan dipilih dapat diketahui apa sebagai Tegangan Menengah atau Tegangan Rendah. Penyediaan daya listrik untuk Gedung Kantor terdiri dari: Sumber Daya Listrik Utama (dilayani oleh sumber PLN) dan Sumber Daya Listrik Cadangan. Sampai saat ini PLN, masih memiliki masalah dengan ketersediaan sumber daya listriknya, maka untuk menjamin adanya sumber daya listrik pada saat PLN mengalami gangguan, disediakan *Diesel Generator Sets*. Pelayanan sumber daya listrik cadangan adalah 50% dari total kebutuhan daya.



Gambar 4. 14 Diesel generator siets

- **Sistem Penginderaan Kebakaran, Alarm dan Tanda-tanda Khusus (*Fire Alarm System*)**

Merupakan sistem pendeteksian bahaya kebakaran sedini mungkin dengan cara pendeteksian otomatis maupun manual. Sistem pendeteksian kebakaran disesuaikan dengan kondisi ruangan serta kemungkinan-kemungkinan sumber kebakaran. Sistem penginderaan api menggunakan *central control fire alarm (Master Control Fire Alarm)* sebagai perangkat utama dari keseluruhan sistem.



Gambar 4. 15 Central control fire alarm

- **Sistem Tata Suara**

Sistem tata suara sebagai prasarana untuk “*Voice Evacuation*” dan dapat juga sebagai paging dan *public address call* yang terpusat pada *control room*, maka sistem tata suara yang bekerja pertama-tama adalah lantai di atasnya dan dibawahnya, selang waktu 60 detik kemudian, maka sistem tata suara bekerja secara menyeluruh ke setiap lantai. Pelayanan operasi sistem tata suara/*paging system* dapat dilakukan secara per zone, per lantai dan lain-lain sesuai kebutuhannya.



Gambar 4. 16 Sound System

- **Sistem Telepon**

Sistem telepon yang diusulkan adalah sistem yang dapat memberikan pelayanan kepada para pemakai untuk berkomunikasi baik ke dalam maupun ke luar bangunan. Penomoran hubungan keluar untuk nomor-nomor tertentu atau kemungkinan hubungan dari luar untuk nomor-nomor pesawat tertentu seluruhnya akan dilayani oleh sistem PABX (*Private Automatic Branch Exchange*).



Gambar 4. 17 Voice evacuation

- **Sistem CCTV**

Sistem CCTV Adalah merupakan sistem *security* dengan kamera yang terdiri dari kamera dan *monitor control*, sebagai perangkat untuk mengetahui dan merekam seluruh aktifitas tamu yang keluar masuk, sehingga faktor keamanan akan dapat terkontrol meskipun pada ruang publik.

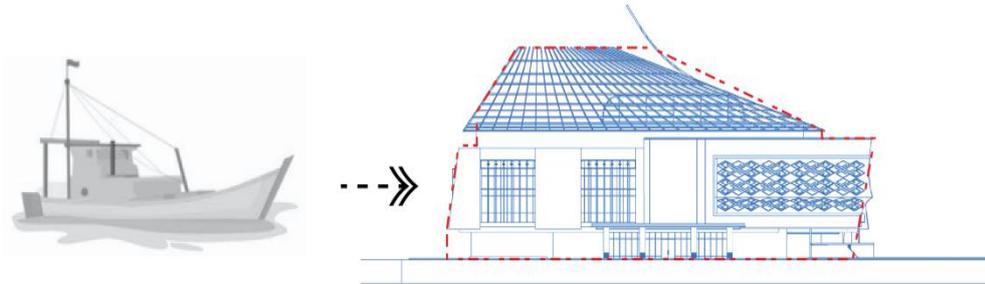


Gambar 4. 18 CCTV

4.5 ANALISA ARSITEKTURAL

4.5.1 Pengembangan prinsip budaya lokal

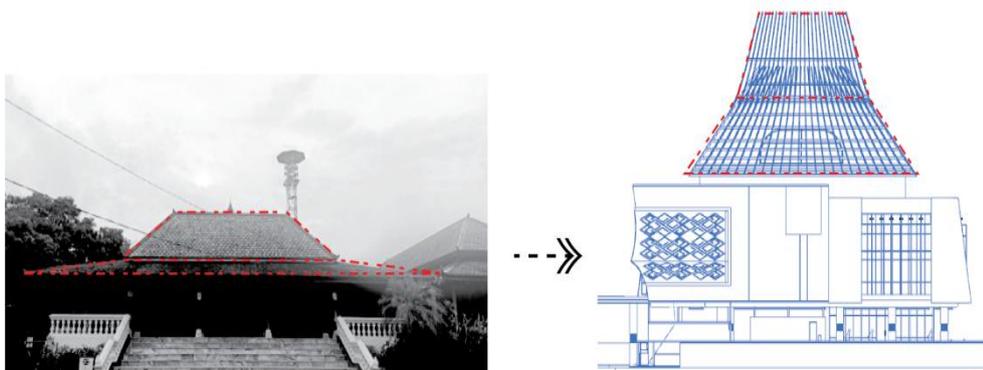
4.5.1.1 Bentuk Bangunan Utama



Gambar 4. 19 Bentuk bangunan utama

Untuk Fasad yaitu bangunan utama sendiri dalam hal ini penulis terinspirasi dari sebuah “perahu” yang mana menggambarkan dari kondisi sebagian besar masyarakat Jepara bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jepara merupakan kota pantai dengan dua sisi pembatas wilayah wilayah Kabupaten Jepara adalah berbatasan dengan laut yaitu sisi sebelah barat dan sebelah utara. Di antara 14 kecamatan di Kabupaten Jepara, hanya ada 6 kecamatan yang tidak memiliki wilayah pantai. Sementara 8 kecamatan yang lain semua memiliki wilayah pantai. Selain itu, Kabupaten Jepara memang sangat potensial dalam bidang kenelayanan yang mana tentu saja ditunjang dengan beberapa faktor.

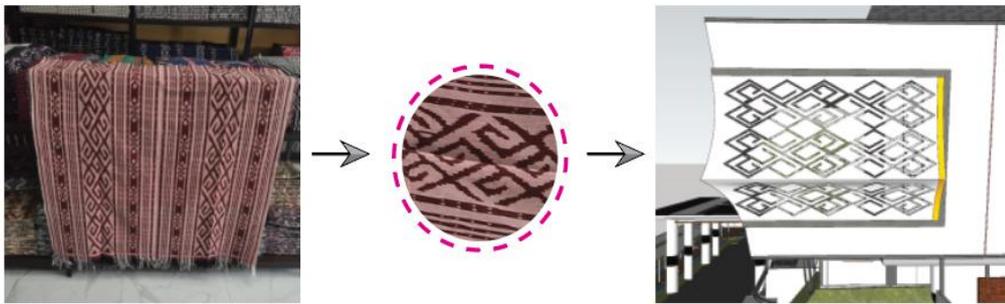
4.5.1.2 Implementasi Atap Joglo



Gambar 4. 20 Implementasi atap joglo

Mengenai implementasi atap joglo sendiri dalam hal ini penulis terinspirasi dari salah satu bangunan masjid kuno yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yaitu Masjid Mantingan (Masjid Astana Sultan Hadirin) yang mana masjid tersebut memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa. Contohnya saja yaitu atap tumpang dan mustaka sendiri yang merupakan akulturasi dari arsitektur Majapahit Tionghoa.

4.5.1.3 Motif Batik Blangket Troso



Gambar 4. 21 Motif batik blangket troso

Tenun troso merupakan kain tenun khas dari kota Jepara. Dalam hal ini penulis mengambil motif blangket tenun troso sebagai icon pada pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara yang mana menggambarkan karakter lokal kota jepara disamping Kota Jepara yang terkenal akan ukirannya. Motif blangket tenun tersebut menunjukkan bahwa ada kesinambungan dan saling terhubung satu sama lain yang mana Mall Pelayanan Publik memang harus terbuka dan terpadu kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 PENGEMBANGAN KONSEP PERANCANGAN

Tujuan di rancang dan dibentuknya gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara sendiri bermula dari adanya keluhan masyarakat setempat akan kurangnya pelayanan serta fasilitas yang memadai terlebih mengenai fasilitas tentang pelayanan publik. Disisi lain ditambah kondisi gedung Mall Pelayanan Publik yang sangat minim fasilitas dan kurangnya ruang pelayanan untuk semua instansi menambah keresahan masyarakat untuk mengurus segala macam bentuk pelayanan.

Dari problematika tersebut dalam hal ini penulis mempunyai ide bagaimana cara menciptakan sebuah Gedung yang *Low maintenance* dengan pengembangan prinsip budaya lokal sebagai unsur jati diri dari Kabupaten Jepara sendiri. Dan untuk menjawab problematika tersebut penulis menerapkan konsep arsitektur Neo Vernakular pada perancangan gedung Mall Pelayanan Publik Jepara nantinya. dengan pembangunan pada bangunan tersebut tidak lupa dibuat dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan menciptakan hubungan emosional antara manusia dan elemen kehidupan alam yang ada di sekitarnya, dan diaplikasikan ke dalam kawasan bangunan.

5.1.1 Secondary skin

Material ini menggunakan *metal cutting*, dengan Motif Batik Blangket Troso, hal ini dikarenakan dengan batik troso tersebut kita bisa melihat jika di Jepara tidak hanya terkenal dari segi seni ukirannya saja.

5.1.2 Foliage

Foliage ini berfungsi untuk meredam panas sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan, disisi lain dengan bukaan yang besar maka sirkulasi penghawaan pastinya akan berjalan dengan sempurna.

5.1.3 Glassblock

Material ini kita menggunakan 2 tipe *Glassblock* Mulia dengan ukuran 24x24 *clear* dan *sandblast*, karena dengan *glassblock* dapat meneruskan Cahaya sampai ke dalam bangunan, disisi lain juga bisa menciptakan *silluet* di sare terdekat *glassblock* tersebut.



Gambar 5. 1 Glassblock

5.2 SIMPULAN

Dari apa yang sudah dipaparkan penulis sebelumnya mengenai latar belakang pembangunan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan dan menciptakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat yang berarti pelayanannya cepat, secara alami sederhana, terjangkau, aman dan nyaman. Dari hal tersebut, tentu saja diperlukan sebuah langkah yang diambil agar tetap bisa beradaptasi dan inovatif dengan tidak melupakan prinsip-prinsip dari MPP itu sendiri yang berupa keterpaduan, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kemudahan terlebih mengingat bahwa segala macam perubahan di era globalisasi yang semakin maju.

Mengenai pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara penulis mengusung konsep melalui pendekatan Arsitektur Neo-vernakular dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan masjid Astana Sultan yang memiliki gaya campuran dari kerajaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri. Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi “perahu” yang mana menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Jepara adalah sebagai nelayan. Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara dengan melalui pendekatan arsitektur Neo-vernakular diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih ideal untuk masyarakat setempat dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman yang semakin modern.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anggraini, E., Suroto, W., & Daryanto, T. J. (2016). Sentra Usaha Kecil Menengah Dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular di Surakarta. *Arsitektura*. Vol.14.
- Azismail, Rezaldi, and Endang Setyowati. *Perancangan museum batik nasional di kota yogyakarta dengan pendekatan arsitektur neo vernakular*. Diss. University of Technology Yogyakarta, 2020.
- Cahyadi, Dedy, and Murwantoro Panghargiyo. *PUSAT KEBUDAYAAN DI MANDALIKA LOMBOK TENGAH, NTB Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular DESIGN OF A CULTURE CENTER IN MANDALIKA, CENTRAL LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT With a Neo Vernacular Architectural Approach*. Diss. University of Technology Yogyakarta, 2021.
- Erdiono, D. (2011). Arsitektur “Modern” (Neo) Vernakular Di Indonesia. *Jurnal Sabua* Vol. 3.
- Jencks, C. *The Language of Post-Modern architecture*. New York: Rizzoli.
- Saidi, Agus Wiryadhi, Ni Putu Anggita Suma Astari, and Krisna Adi Prayoga. "Penerapan Tema Neo Vernakular Pada Wajah Bangunan Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali." *Jurnal Teknik Gradien* 11.2 (2019): 136-144.
- Wicaksono, Muhammad Ramanindra, and Anisa Anisa. "Kajian Konsep Arsitektur Neo Vernacular Pada Desa Wisata Tamansari." *Journal of Architectural Design and Development (JAD)* 1.2 (2020): 111-124.

PERATURAN

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

WEB

Yandip Prov Jateng, “Mall Pelayanan Publik Jepara Diresmikan”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mal-pelayanan-publik-jepara-diresmikan/> diakses 11 Oktober 2023.

Tjok Pradnya Putra, (2013) Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular. <https://www.scribd.com/doc/135985062/Pengertian-Arsitektur-Neo-Vernakular>. Diakses pada tanggal 22 November 2023.

MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEPARA



STUDIO TUGAS AKHIR
MUHAMMAD RIZQI (2004056017)

PEMBIMBING I
SHOFIYAH NURMASARI, MT.

PEMBIMBING II
MIFTAKHUL KHAIRI, M.Sn.



Latar belakang

Pesatnya perkembangan era globalisasi saat ini mempengaruhi banyaknya inovasi yang dihasilkan di berbagai bidang termasuk administrasi publik. salah satu bentuk Reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang mana selalu memperbaharui diri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak mengalami stagnasi atau tertinggal. MPP Kabupaten Jepara yaitu berdasarkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat pada jangka panjang 5-10 Tahun kedepan terkait gedung MPP tersebut terjadi pengurusan instansi lama yaitu Dinsos permades, tentunya perlu dilakukan sebuah pembaharuan serta inovasi lebih lanjut (tanpa melakukan pengurusan gedung lama), kemudian juga terkait dengan fasilitas di MPP sendiri terlebih dalam bidang pelayanan yang masih terbilang belum cukup memadai menjadikan penulis tertarik untuk melakukan pembaharuan pada MPP di Kabupaten Jepara.

Urgensi

Pendekatan dalam desain bangunan MPP haruslah holistik dan beragam, mengakomodasi urgensi-urgensi yang beragam pula. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat umum, anggota legislatif, dan para ahli desain dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa desain akhir mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, pendekatan berkelanjutan menjadi imperatif, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam setiap aspek konstruksi dan pengoperasian bangunan. Aspek kultural dan kontekstual pun tak boleh terlupakan, karena hal ini memastikan bahwa bangunan MPP tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga terhubung erat dengan identitas budaya dan sejarah lokal. Di samping itu, pendekatan inovatif dan adaptif diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi terbaru dan mengantisipasi perubahan kebutuhan di masa depan. Kolaborasi antara tim multidisiplin juga menjadi kunci, memastikan bahwa semua aspek desain, termasuk estetika, fungsionalitas, dan keamanan, diintegrasikan secara holistik untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi proses pengambilan keputusan.



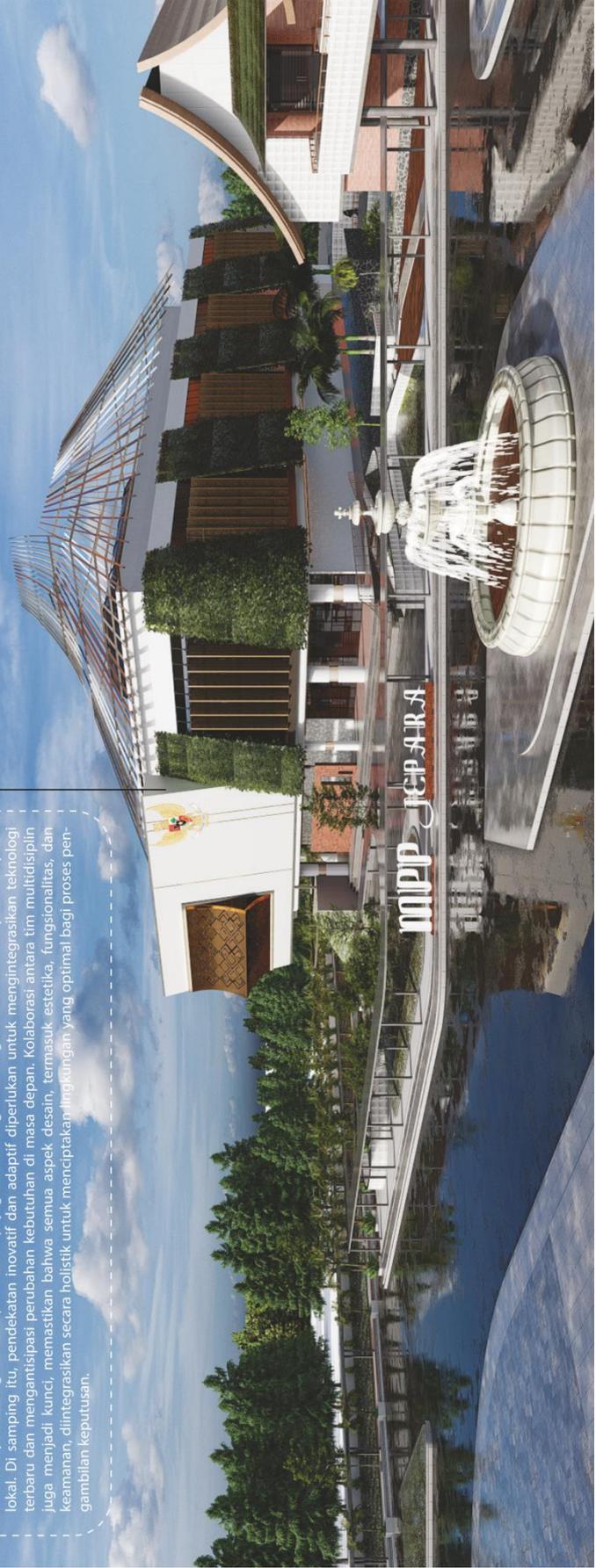
EKONOMI

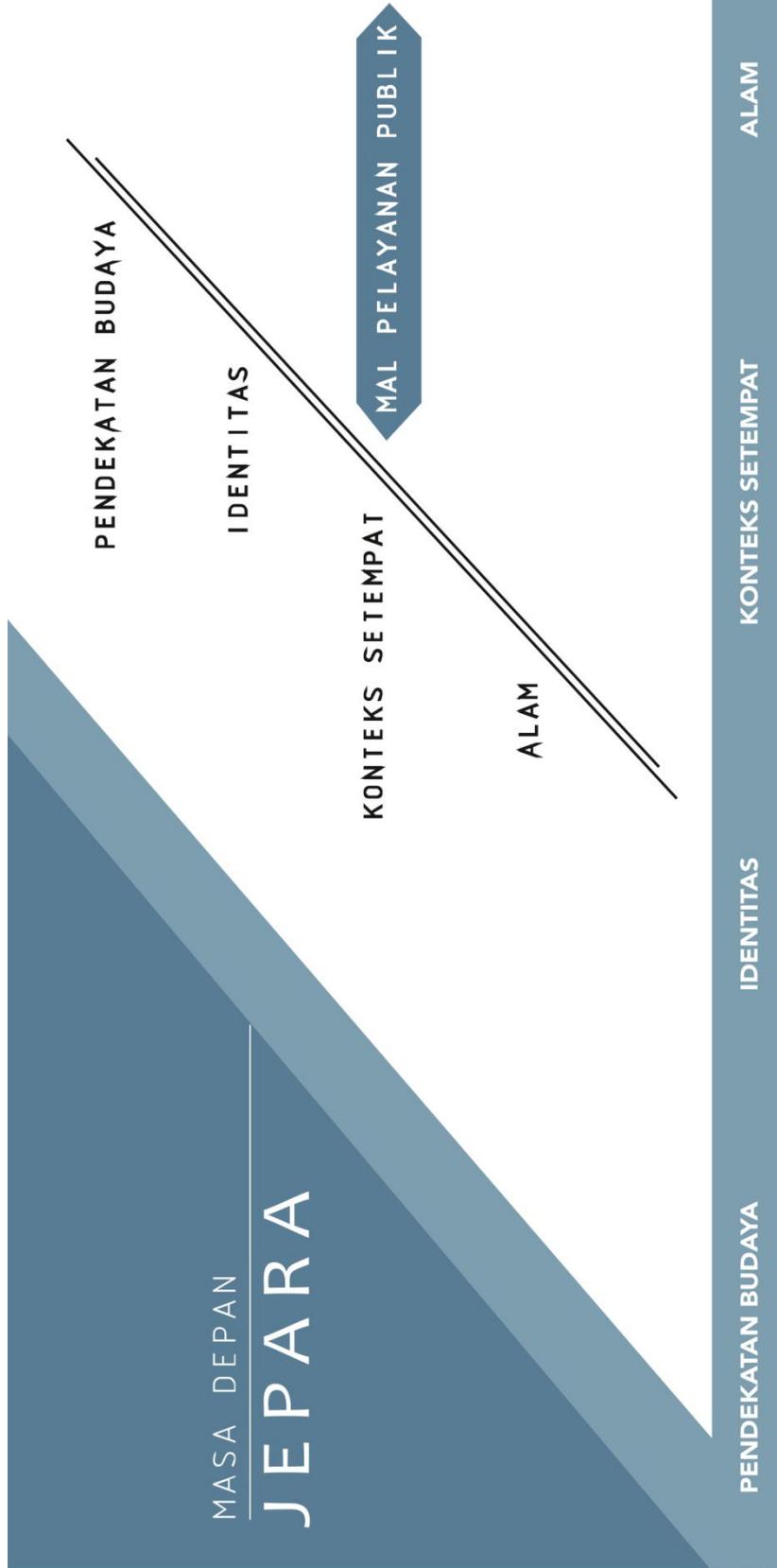
Desain harus mempertimbangkan efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasional, serta potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, melalui penggunaan sumber daya lokal dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.



SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Aspek sosial budaya harus menjadi fokus utama. Desain harus memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai kultural masyarakat yang akan dilayani oleh bangunan tersebut. Hal ini melibatkan pengakuan atas keanekaragaman budaya, peningkatan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan desain dan penggunaan bangunan MPP.





PENDEKATAN BUDAYA

Penggunaan blangket tenun troso dengan motif khas tradisional Jepara pada bangunan tersebut tidak hanya sebagai element dekoratif, akan tetapi juga mencerminkan kekayaan warisan budaya dan memperkuat identitas lokal setempat. Di sisi lain, penggunaan blangket tenun troso sebagai elemen desain arsitektur tidak hanya menghadirkan keindahan visual saja tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai persatuan, keterampilan, dan warisan budaya yang dianut oleh masyarakat Jepara. Oleh sebab itu, penggunaan blangket tenun troso pada bangunan arsitektur tidak hanya menciptakan estetika yang unik, melainkan juga kekayaan dari budaya lokal.

IDENTITAS

Identifikasi etnis Jepara terutama dari segi unsur arsitektur. Hubungan tersebut berkaitan dengan pola tata ruang yang menjadi ciri khas arsitektur daerah masing-masing. Hal ini mempengaruhi desain tata ruang bangunan yang mempunyai denah dan orientasi tengah (terpusat). Faktor ini dipengaruhi oleh karakteristik arsitektur lokal dari tiga etnis besar yang ada di Kabupaten Jepara yaitu etnis Jawa, Hindu, dan Tionghoa.

KONTEKS SETEMPAT

Kondisi lingkungan setempat mempunyai dampak yang sangat besar terhadap bangunan, dimana pengaruh tersebut meliputi adat istiadat masyarakat setempat serta lingkungan setempat dan lain sebagainya. Dari hal tersebut tentu saja bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan yang dihasilkan mendapat konteks terhadap lingkungan. Misalnya Masyarakat sering berkumpul dalam suatu komunitas baik itu acara adat maupun kegiatan lainnya. Pola berkumpul biasanya selalu dituangkan dalam bentuk unit komunitas yaitu satu kesatuan dari masyarakat atau populasi lokal (penduduk setempat).

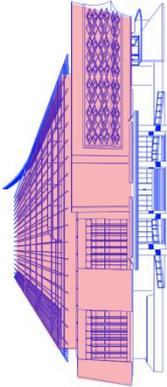
ALAM

Di kembangkan dalam penyatuan landscape dan arsitektur seakan menjadi komposisi yang tak terpisahkan. selain itu alam akan menjadi ekspresi utama landscape untuk melambungkan kemakmuran agrikultur.



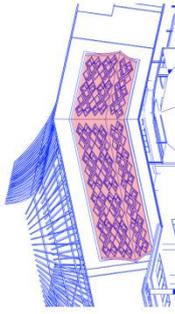
PERAHU NELAYAN

Fasad menyerupai bentukperahu untuk merespon konteks kabupaten Jepara sebagai kota pesisir dan mangrove lokal, serta perahu tersebut yang mana menggambarkan dari kondisi sebagian besar masyarakat Jepara bermata pencaharian sebagai nelayan.



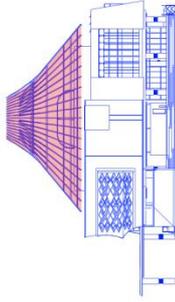
BATIK TENUN TROSO

Motif blangket troso pada fasad bangunan sebagai icon Mall Pelayanan Publik juga mewakili karakter daerah kota Jepara. selain julukannya sebagai kota ukir juga terdapat warisan budaya lainnya yaitu blangket tenun troso. Motif batik tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dan keterhubungan satu sama lain. Hal ini dikarenakan, Mall Pelayanan Publik harus terbuka dan terintegrasi dengan masyarakat.

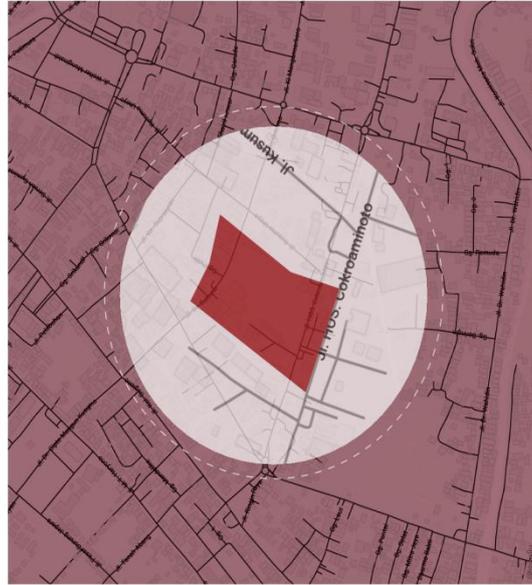


ATAP MASJID MANTINGAN

Bentuk utama massa bangunan mall pelayanan publik mengadopsi bentuk masjid sunan hadlirin mantingan. Tentu saja dengan tujuan untuk mengangkat konteks lokalitas daerah kabupaten Jepara serta menjaga warisan dari para leluhur. Disisi lain Masjid Mantingan tersebut juga merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia.



SITE CONTEXT



Site terletak di Jln HOS Cokroaminoto dengan luas lingkup lahan 18.699 m². site tersebut terletak di tengah kota dan tentu saja memiliki akses yang mudah, sehingga pencantumannya dalam site plan akan memudahkan masyarakat untuk mengunjungi MPP. Berdasarkan RDTR Kabupaten Jepara, telah ditetapkan peraturan pada lokasi Jln HOS. Cokroaminoto sebagai berikut:

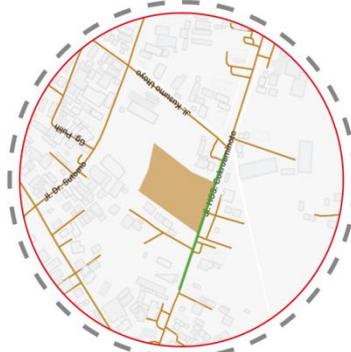
- (-) KDB : 60%
- (-) KLB : 1,20
- (-) GSB : 15

REGULASI

PP, No 21 tahun 2021	Penyelenggaraan penataan ruang
Permen Pendayagunaan	Teknis Mal Pelayanan Publik
KemenPan-Rb, no 11 tahun 2018	Penetapan penyalahgunaan MPP
Perpres, no 89 tahun 2021	Penyelenggaraan MPP
Perda, No 4, tahun 2016	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Perbup, No 5 tahun 2020	Penyelenggaraan MPP

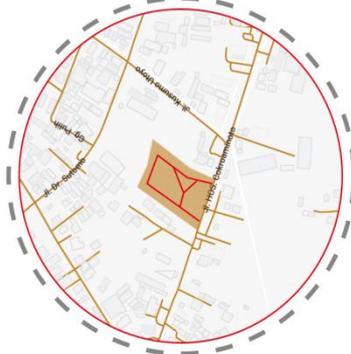
ANALISIS SITE

AKSESIBILITAS



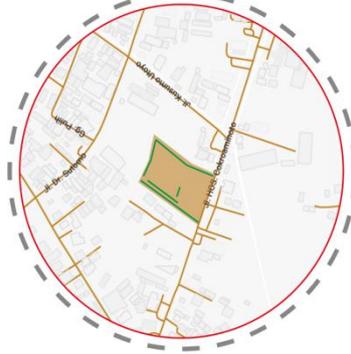
Lokasi site dengan ruang-ruang yang penuh tentu saja membutuhkan ruang korelasi dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama bagi pejalan kaki. Maka dari itu, trotoar sepanjang Jalan akan tetap di pertahankan dan didukung dengan melakukan penghijauan agar memberikan rasa nyaman terkhusus bagi pejalan kaki

SIRKULASI



Untuk akses masuk dan keluar kawasan akan di pisah dengan jalur yang berbeda, hal ini dikarenakan agar pengguna kendaraan dapat mengelilingi kawasan tersebut serta mengenal lebih dekat area site. Dan untuk pejalan kaki sendiri akan di berikan fasilitas sitting area pada point of view agar tercipta rasa aman serta nyaman bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut.

VEGETASI



Minimnya vegetasi pada area site tersebut. Oleh sebab itu, pada kawasan tersebut ditanami beberapa tanaman yang mana tidaklah lain untuk memfilter polusi udara, meminimalisir kebisingan pada area site dan disisi lain juga untuk memberikan kenyamanan termal pada kawasan tersebut.

1. Tumbuhan peneuduh ketapang kencana,
2. pohon cemara, pohon palem, pohon flamboyan,
3. tanaman hias aglaonema, philodendron, monstera, homalomena, keladi dll

ANALISIS SITE

VIEW



Mat pelayanan publik ikonik dengan mengangakat karakter dan kearifan lokal, sejarah kabupaten, mewakili kabupaten Jepara sebagai kota pesisir. Si setiap sudut pada bangunan mempunyai daya tarik tersendiri dan dapat di lihat di arah depan. sehingga memaksimalkan area depan sebagai pengimplemtasian budaya jepara.

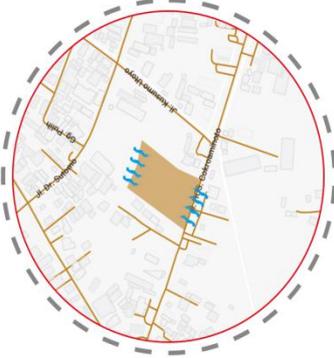
MATAHARI



Desain Bangunan dengan menghadap selatan mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memaksimalkan bukaan serta memberikan skylight untuk taman indoor dengan tujuan agar dapat memberikan pencahayaan alami, kemudian untuk bangunannya sendiri menggunakan sistem smart energi.
2. Memberikan shading dengan menggunakan volllisinar matahari untuk menambah sirkulasi udara/penghawaan serta untuk mengurangi udara kotor yang masuk disebabkan polusi dari luar bangunan

PENGHAWAAN



Penggunaan ruang semi outdoor dan bukaan yaitu cross ventilation dimaksudkan agar dapat memaksimalkan sirkulasi udara "penghawaan" dari luar agar dapat masuk kedalam bangunan. Kemudian shading vollliage juga sangat berpengaruh untuk menciptakan serta memberikan garuh yang bagus. Untuk meredam panas dari sinar matahari dalam hal ini menggunakan "Reflection poli" agar penguapan dari air tersebut dapat memberikan efek sejuk pada sekitar area tersebut

REFLECTION POOL

menciptakan pantulan yang jelas dari bangunan atau lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menambahkan dimensi visual dan keindahan pada desain bangunan serta menciptakan kesan harmonis dengan lingkungannya. reflection pool ini akan menguapakan air yang kena paparan sinar matahari menuju ke dalam bangunan.

SKYLIGHT

Skylight membantu mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan dan menciptakan suasana ruangan yang lebih terang, terbuka, dan nyaman bagi penghuninya. Selain itu, skylight juga dapat memberikan sirkulasi udara tambahan dan memperbaiki ventilasi di dalam bangunan.

SOLAR PANEL

Membantu mengurangi jejak karbon bangunan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Dengan memasang panel surya, bangunan dapat menghasilkan energi hijau sendiri, mengurangi biaya energi jangka panjang, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.



RAIN HARVESTING

1. Memanfaatkan air hujan yang biasanya terbuang untuk keperluan non-potabel seperti penyiraman taman atau keperluan industri.
2. Mengurangi kebutuhan akan energi yang diperlukan untuk memompa air dari sumber air bawah tanah atau air permukaan.

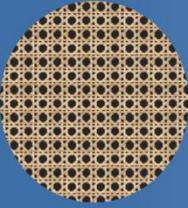
Sequence Garden

Membantu meningkatkan konektivitas antar-ruang di dalam bangunan, memberikan akses ke ruang terbuka bagi penghuni, serta mempromosikan interaksi sosial.



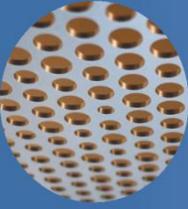
GLASSBLOCK (SANDBLAST&CLEAR)

Material ini kita menggunakan 2 tipe Glassblock. Mulia dengan ukuran 24x24 clear dan sandblast, karena dengan glassblock dapat meneruskan Cahaya sampai ke dalam bangunan, disisi lain juga bisa menciptakan siluet di sare terdekat glassblock tersebut



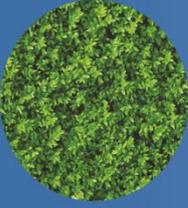
ROTAN ANYAM

Rotan yang dianyam dengan pola terbuka dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara di dalam bangunan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan dengan bahan yang lebih p e r m e a b e l i .



PERFORATED METAL

Perforated metal dapat difungsikan untuk mengatur pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan. Lubang-lubang pada permukaan logam memungkinkan cahaya untuk menyang masuk ke dalam ruangan dengan cara yang terkontrol, menciptakan efek pencahayaan yang menarik dan e m b u t



FOLIAGE

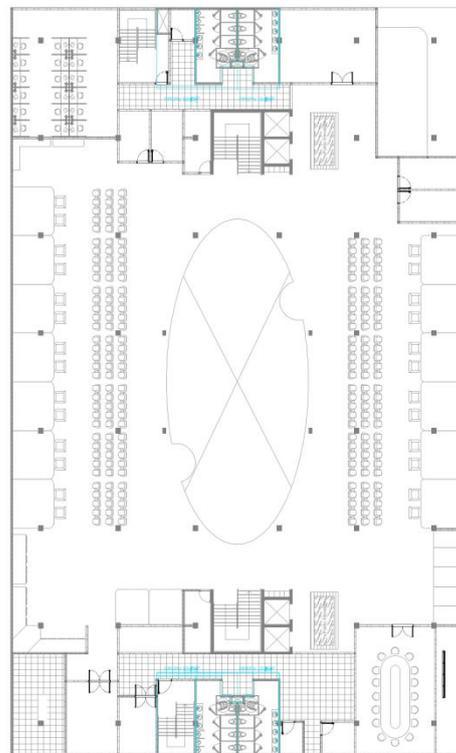
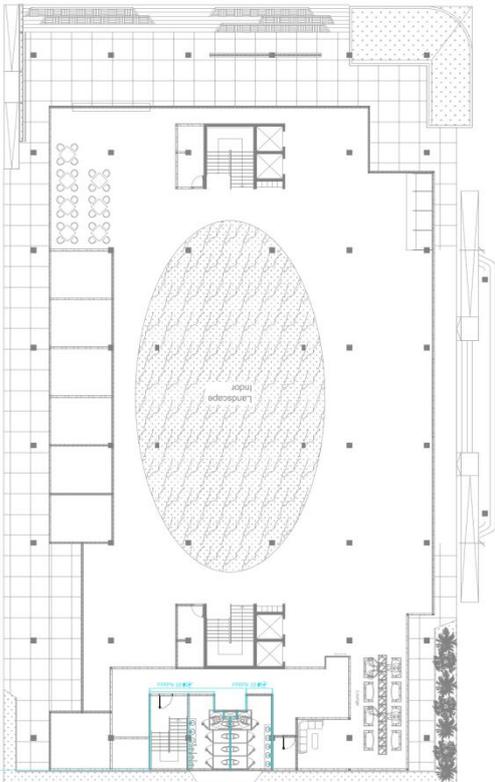
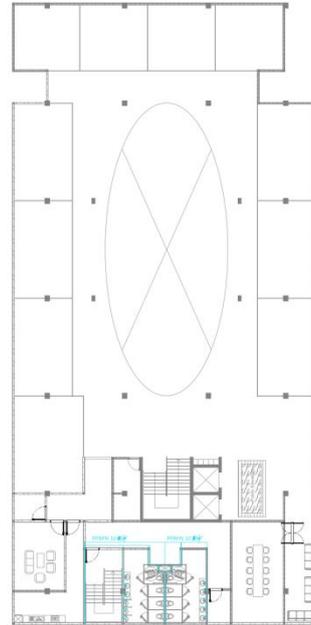
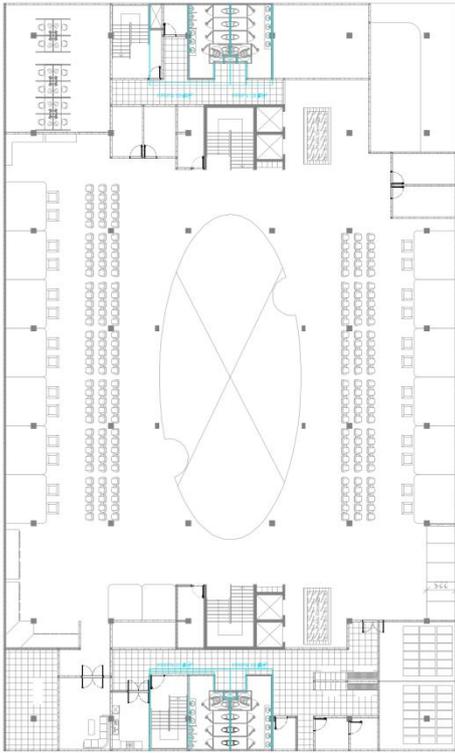
Tanaman hidup pada dinding bangunan dapat berfungsi sebagai lapisan tambahan isolasi termal, membantu mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan atau pemanasan ruangan



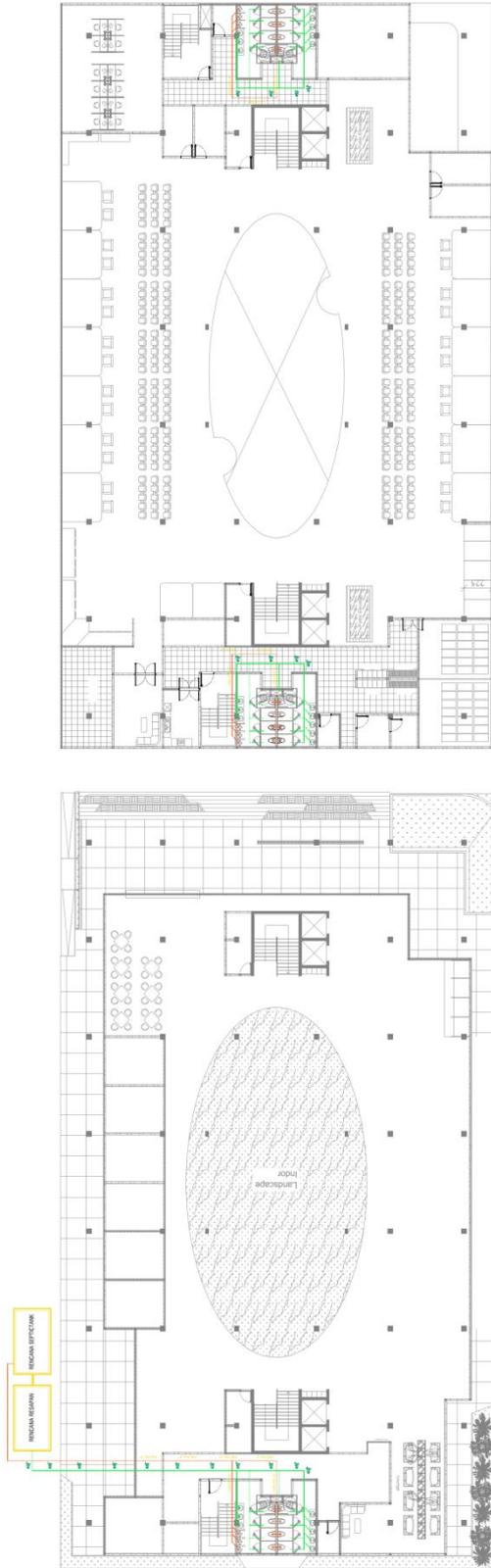
TEMPERED GLASS

Tempered glass juga memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan suhu yang tiba-tiba, membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan ekstrem, seperti area yang terpapar sinar matahari secara langsung.

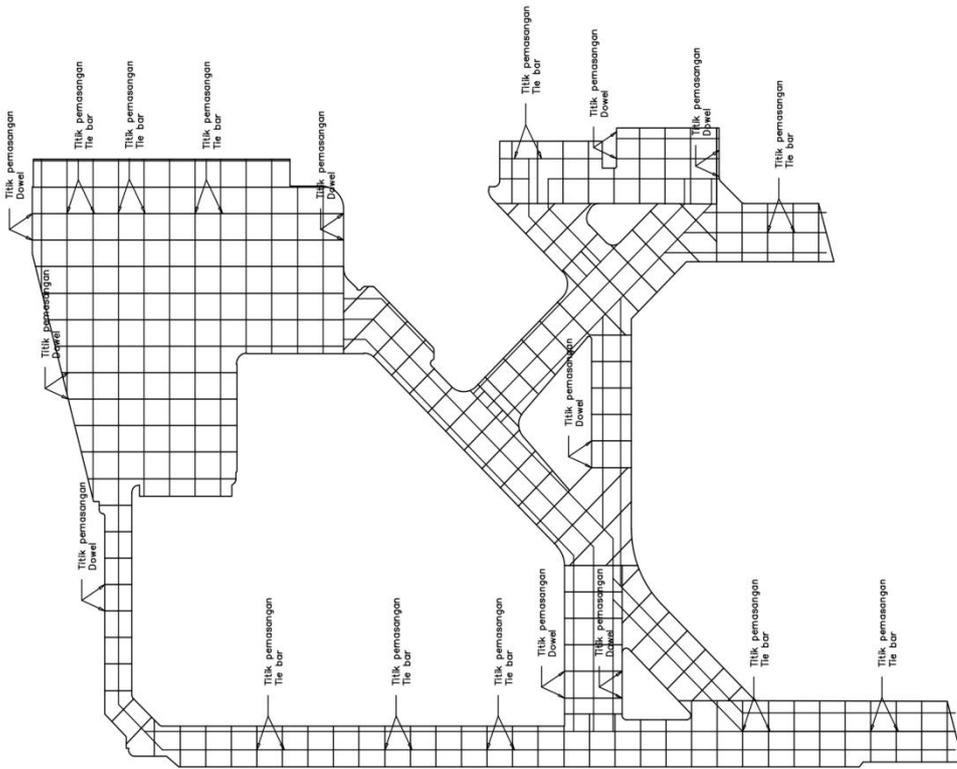
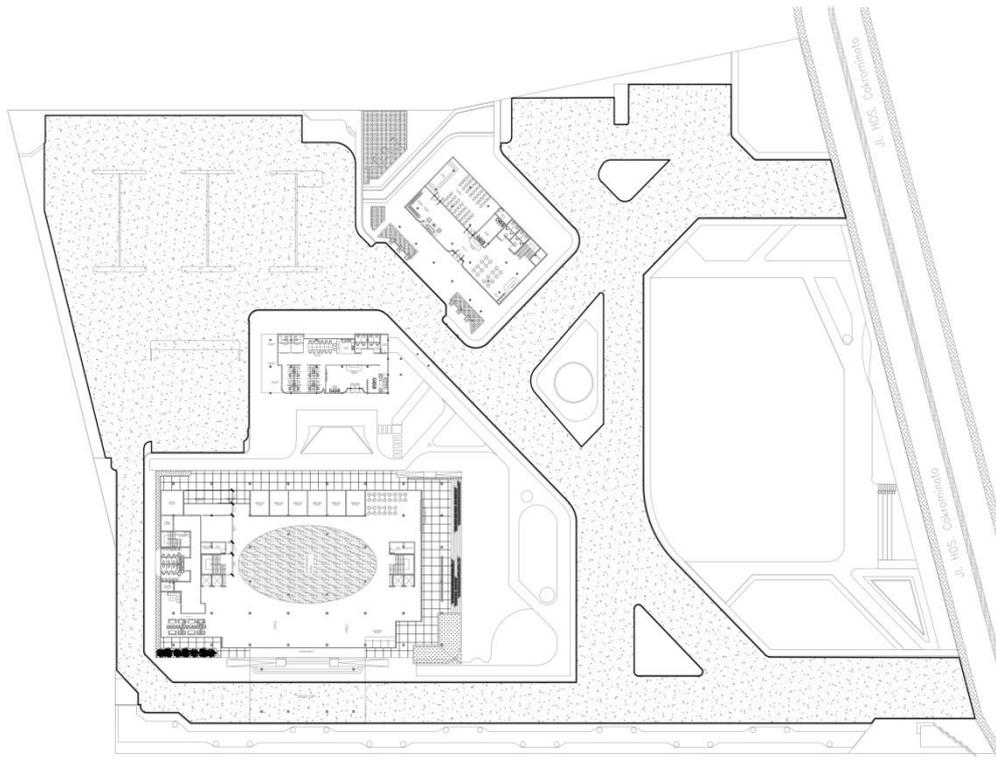




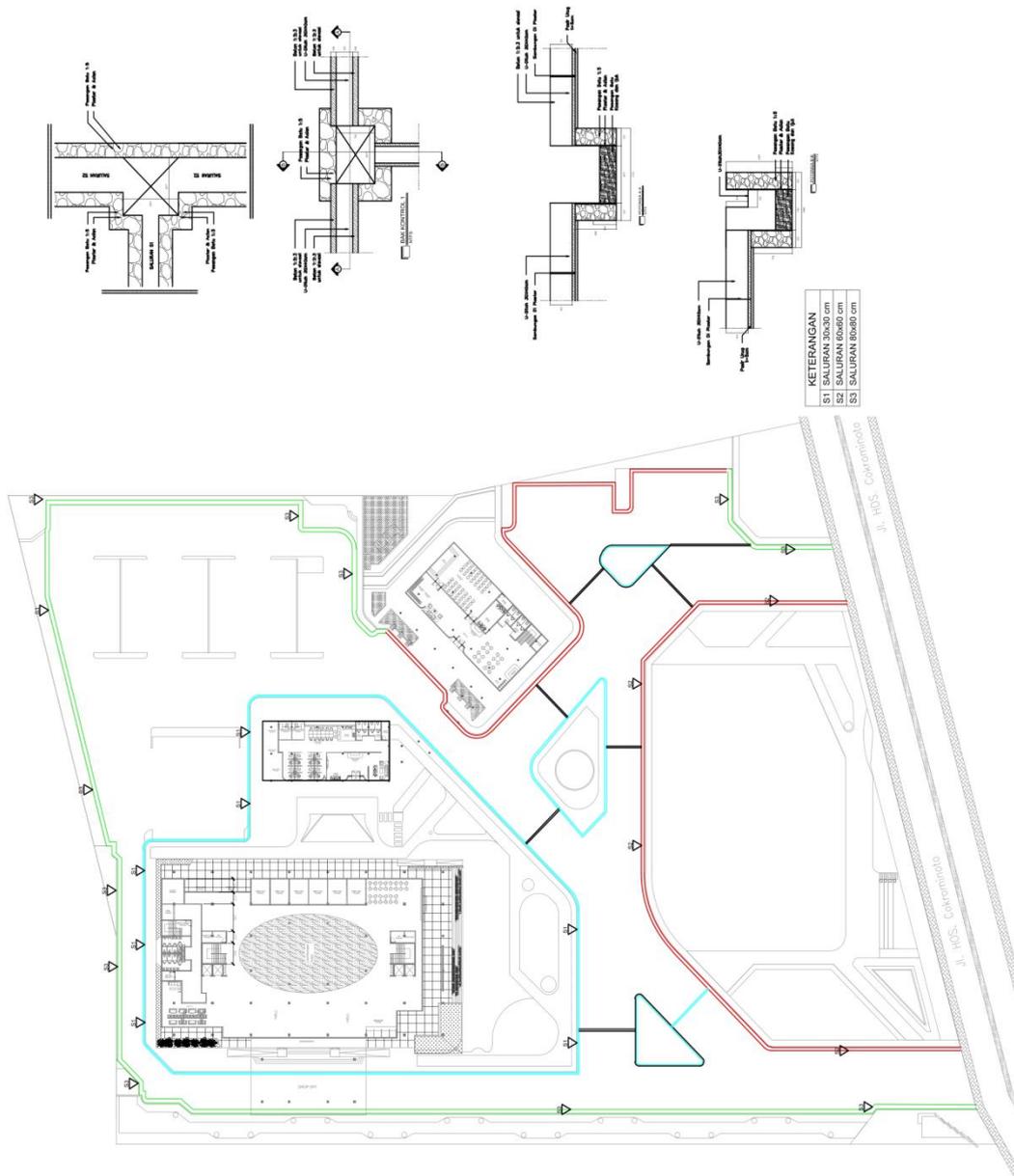
RENCANA AIR BERSIH



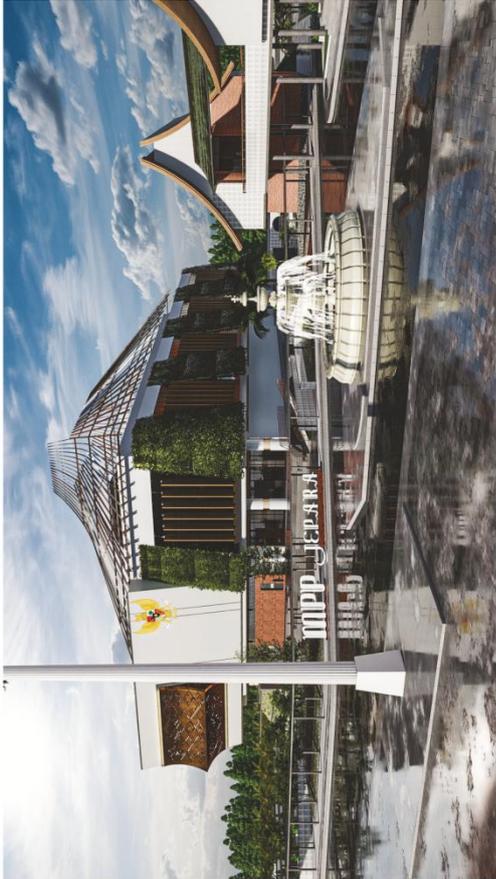
RENCANA AIR BEKAS DAN AIR KOTOR



RENCANA JALAN



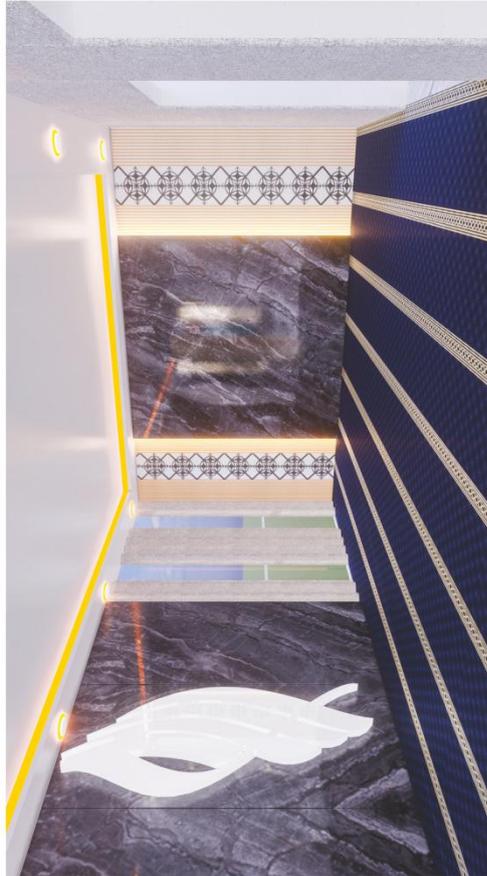
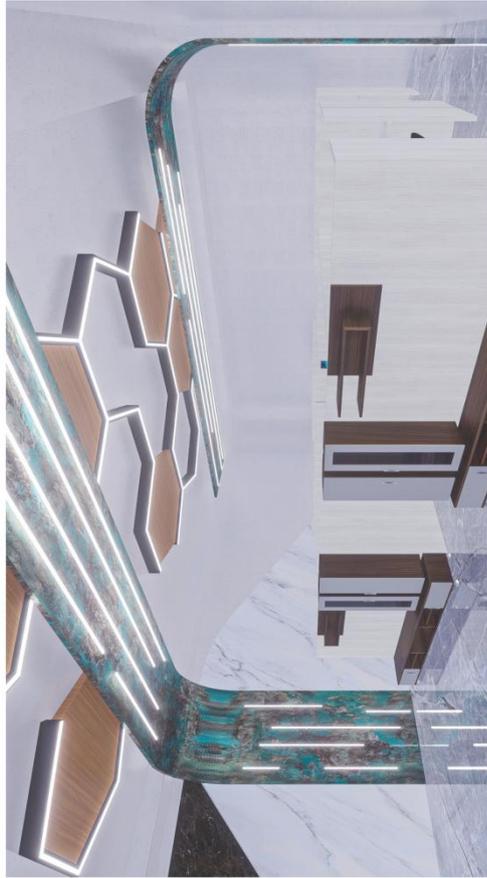
RENCANA SALURAN KAWASAN



EKSTERIOR



EKSTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Muhammad Rizqi
NIM : 2004056017
Tempat,, tanggal lahir : Jepara, 6 Desember 2001
Alamat Rumah : Desa Jondang RT 003/RW 001, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah
Alamat Domisili : Jl. Mega Raya X No.250, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Nomor Handphone : 08984390040
Email : Rizqi.id012@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Tahun 2020 - Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2017 - 2020 SMA Walisongo
3. Tahun 2014 - 2017 SMP Islam Darurrohman
4. Tahun 2009 -2014 SD 01 Jondang

C. Pengalaman kerja dan magang

1. Furniture 2018- sekarang (pekerjaan)
2. Geometri arsitektur 2023 - sekarang (Kerja)
3. CV. Dita Widia Rekayasa Desember 2022- Januari 2023 (Kontrak Kerja)
4. CV. Mitra desain November 2022 - Januari 2023 (kontrak kerja).

